

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SOSIAL NGAWI DALAM  
MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN NGAWI MELALUI PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RAKHMA ROUDLOTUL KHUSNA**

**NIM. 161211168**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2020**

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SOSIAL NGAWI DALAM  
MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN NGAWI MELALUI PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial



Oleh:

**RAKHMA ROUDLOTUL KHUSNA**

**NIM. 161211168**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhma Roudlotul Khusna

NIM : 161211168

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)” adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Surakarta, 7 September 2020

Yang menyatakan,



(Rakhma Roudlotul Khusna)

**Dr. Hj. KAMILA ADNANI, M.Si.**

**DOSEN PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Sdri. Rakhma Roudlotul Khusna

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Rakhma Roudlotul Khusna

NIM : 161211168

Judul : Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 September 2020  
Pembimbing,



Dr. Hj. Kamila Adnani, M.Si  
NIP. 19700723 200112 2 003



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SOSIAL NGAWI DALAM**  
**MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**  
**DI KABUPATEN NGAWI MELALUI PROGRAM KELUARGA**  
**HARAPAN (PKH)**

Disusun Oleh:

Rakhma Roudlotul Khusna

NIM. 161211168

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

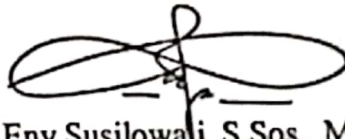
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Pada Hari Senin, tanggal 02 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial

Surakarta, 21 Desember 2020

Penguji Utama,



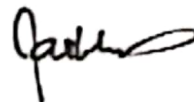
Eny Susilowati, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19720428 200003 2 002

Penguji/Ketua Sidang,



Dr. Hj. Kamila Adnani, M.Si.  
NIP. 19700723 200112 2 003

Penguji/Sekretaris Sidang,



Fathan S. Sos., M.Si.  
NIP. 19690208 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah



Dr. Fathah, M.Ag.

NIP. 19730522 200312 1 001

## **MOTTO**

**Menjadi lentera bagi orang lain lebih baik daripada menjadi lilin, karena dengan begitu akan lebih banyak orang yang dapat kemanfaatanmu secara langgeng.**

(Putri Anandhita)

**Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, tapi setelah itu harus bangkit lagi.**

(Joko Widodo)

**Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.**

(Q.S Al-insyirah ayat 6)

## ABSTRAK

**RAKHMA ROUDLOTUL KHUSNA. NIM: 16.121.1.168. Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.**

Kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah sebuah tujuan dari pembangunan nasional suatu negara. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu menyumbangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang sedang dihadapi Dinas Sosial Ngawi terkait dengan masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi menempati posisi paling tinggi se Karesidenan Madiun. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Dinas Sosial Ngawi yakni dengan mengimplementasikan Bantuan Sosial PKH menggunakan strategi komunikasi agar bantuan tepat sasaran sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan di Ngawi dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Ngawi dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi melalui PKH. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Ngawi menggunakan program pemantaban Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan *graduasi* mandiri dengan menggunakan teori strategi komunikasi Anwar Arifin yang dikaitkan dengan komponen-komponen komunikasi rumusan Harold Laswell. Yakni dengan melakukan pengenalan khalayak melihat dari situasi kondisi KPM PKH saat ingin menyampaikan pesan. Kedua, penyusunan pesan dilakukan oleh Dinas Sosial Ngawi dengan menyusun materi menjadi modul kegiatan P2K2. Ketiga, menentukan metode dengan cara jika ingin menyampaikan informasi tentang kebijakan baru Dinsos Ngawi menggunakan metode *informatif* dan *redudency*, sedangkan kegiatan P2K2 menggunakan metode edukatif, dan untuk program *graduasi* menggunakan metode *edukatif* dan *persuasif*. Keempat, pemilihan media komunikasi yakni Dinas Sosial Ngawi menggunakan Whatsapp sebagai alat penghubung dengan KPM PKH, bekerjasama dengan Radio Suara Ngawi dan juga dengan menggunakan pertemuan dengan para KPM PKH.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan

## **ABSTRACT**

**RAKHMA ROUDLOTUL KHUSNA. NIM: 16.121.1.168. Communication Strategy of the Ngawi Social Service in Overcoming Welfare Problems of the Poor in Ngawi District through the Family Hope Program (PKH). Thesis of Islamic Communication and Broadcasting Study Program. Faculty of Ushuluddin and Da'wah. Surakarta State Islamic Institute. 2020.**

In essence, social welfare is an objective of the national development of a country. Social welfare is a condition for the fulfillment of the material, spiritual and social needs of citizens in order to live properly and be able to contribute themselves so that they can carry out their social functions. Social welfare problems currently facing the Ngawi Social Service are related to the poor. The poverty rate in Ngawi Regency occupies the highest position in the Madiun Residency. One of the poverty alleviation efforts carried out by the Ngawi Social Service is by implementing PKH Social Assistance using a communication strategy so that assistance is right on target so that it can help reduce poverty in Ngawi and achieve the welfare of the poor.

The purpose of this study was to determine the communication strategy carried out by the Ngawi Social Service in overcoming the welfare problems of the poor in Ngawi Regency through PKH. The method used is descriptive method with a qualitative approach. Researchers collected data by interview, observation, and documentation.

The results of this study are that the Ngawi Social Service uses the Family Capacity Building Meeting (P2K2) monitoring program and independent graduation using Anwar Arifin's communication strategy theory which is linked to the communication components of Harold Laswell's formula. Namely by introducing the audience to see the situation of the KPM PKH condition when it wanted to convey a message. Secondly, the Ngawi Social Service Office compiled the message by compiling the material into a P2K2 activity module. Third, determine the method in a way if you want to convey information about the new policy of Dinsos Ngawi using informative and redundancy methods, while P2K2 activities use educational methods, and for the graduation program using educational and persuasive methods. Fourth, the selection of communication media, namely the Ngawi Social Service, using Whatsapp as a means of connecting with KPM PKH, collaborating with Radio Suara Ngawi and also by using meetings with KPM PKH.

**Keywords:** Communication Strategy, Social Welfare, Poverty

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan srata (S1) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Surakarta. Skripsi ini berjudul Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harakan. Dalam kesempatan yang berharga yang sudah didapatkan, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini, antara lain kepada :


1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Agus Sriyanto, S.Sos.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dr. Hj. Kamila Adnani, selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Eny Susilowati, S.Sos., M.Si., dan Fathan, S.Sos., M.Si., selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga , dan pikiran untuk memberikan bimbingan berupa masukan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Zainul Abas, M.Ag selaku wali studi yang telah memberikan pengarahan, saran, serta motivasi agar selalu berprestasi di akademik.

7. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuludin dan Dakwah
8. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta dipermudah dan dibantu dalam proses pencarian data.
9. Bapak dan Ibukku yang selalu menasehati, mendoakan, dan mendukung setiap langkah hidupku, serta adik-adikku yang membuatku selalu bersemangat dalam menjalani hidup ini.
10. Bapak Kusprihyanto Namma dan Bu Kiptiyah selaku bapak ibu angkatku yang telah merawatku dan membantu setiap pengobatanku, serta memberikan motivasi agar melanjutkan studi sarjana bahkan sampai diam-diam mendaftarkanku juga membiayai kuliah pertamaku di IAIN Surakarta
11. Suamiku Muhammad Ali Albais Zein, yang selalu memberikan wejangan, mendoakan, dan mendukung juga menuntun setiap langkah hidupku agar selalu berada dalam jalur ketetapan Tuhan,
12. Pamomongku Mbah Suyamto, yang selalu sabar mewadahi segala kerewelanku dan memanjakanku, dan juga keluarga baruku Bu Bakti sekeluarga bersama Yayasan Amanah yang telah merawatku, memberikan tempat tinggal selama pengerjaan skripsi dan juga anggota Yayasan Amanah yang bersedia kuajak wira wiri ke kampus.
13. Omku Muhammad dan Duo Masku (Mas Sohib dan Mas Rohmat), Hasanuddin yang setia jadi sambatan, teman curhat, diskusi, partner kocak dan memberikan suport kepadaku baik secara moril maupun materiil.
14. Sahabatku sekaligus partner keluarga (Ernawati, Kang Syafi'i & Kang Ali) yang selalu setia menemani dan menghiburku dengan kekonyolan mereka, juga selalu memberikan suport untuk segala bentuk keputusan hidupku. Dan juga khusus Anita Ratna sari dan Kridianto Eko selama 4 tahun perkuliahan senantiasa mensupport dan menemani hampir dalam semua aktivitasku selama kuliah di Solo.
15. Keluarga KPI E, Teman Sekonsentrasi *Public Relations* dan seluruh

teman seperjuanganku, teman seangkatanku yang telah kebersamaiku selama 4 tahun untuk berbagi keluh kesah dan saling tukar ilmu baik saat menerima mata kuliah ataupun saat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Sukoharjo, 10 September 2020



Rakhma Roudlotul Khusna

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	16
C. Batasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah .....	17
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
BAB II : LANDASAN TEORI.....	19
A. Kajian Teoritis.....	19



1. Strategi Komunikasi.....	19
2. Kesejahteraan Sosial .....	26
3. Teori Keluarga .....	27
4. Teori Kemiskinan.....	29
B. Tinjauan Pustaka .....	30
C. Kerangka Berpikir .....	33
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....	35
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	38
F. Keabsahan Data .....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN .....	41
A. Gambaran Umum Lokasi .....	41
1. Profil Dinas Sosial Ngawi.....	41
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Ngawi .....	42
3. Struktur Organisasi.....	43
4. Tugas Pokok.....	46
B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	48
2. Rancangan Umum Pelaksanaan PKH .....	49

3. Kelembagaan PKH di Tingkat Kabupaten .....	59
C. Penyajian Data .....	60
D. Analisis Data .....	71
BAB V : PENUTUP .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Se-Karesiden Madiun Tahun 2015-2019 .....	5
Tabel 2. Jumlah KPM PKH Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2018.....	10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah KPM PKH Perkecamatan Di Kabupaten Ngawi Tahun 2019.	11
Gambar 2. Kerangka Berpikir strategi komunikasi Dinas Sosial Kab. Ngawi mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin .....	34
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.....	45
Gambar 4. Komponen PKH .....	52
Gambar 5. Kewajiban anggota KPM PKH berdasarkan kriteria komponen .....	53
Gambar 6. Alur Pelaksananaan PKH .....	54
Gambar 7. Pelaksanaan pertemuan Awal.....	56
Gambar 8. Tahap Penyaluran .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	95
Lampiran 2: Transkrip Wawancara .....	97
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian .....	106
Lampiran 4 : Surat Acc Penelitian .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah KPM PKH Perkecamatan Di Kabupaten Ngawi Tahun 2019.	11
Gambar 2. Kerangka Berpikir strategi komunikasi Dinas Sosial Kab. Ngawi mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin .....	34
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.....	45
Gambar 4. Komponen PKH .....	52
Gambar 5. Kewajiban anggota KPM PKH berdasarkan kriteria komponen .....	53
Gambar 6. Alur Pelaksananaan PKH .....	54
Gambar 7. Pelaksanaan pertemuan Awal.....	56
Gambar 8. Tahap Penyaluran .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	95
Lampiran 2: Transkrip Wawancara .....	97
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian .....	106
Lampiran 4 : Surat Acc Penelitian .....	116

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah sebuah tujuan dari pembangunan nasional suatu negara. Di dalam UUD 1945 juga telah dijelaskan bahwa tujuan dari kemerdekaan Indonesia sendiri adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu diharapkan pembangunan nasional dapat terwujud sampai pada tahapan keseimbangan dan kedamaian masyarakat. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual.

Secara konseptual kesejahteraan sosial mempunyai berbagai definisi yang relatif berbeda, namun pada dasarnya substansinya sama. Menurut Midgley (2013; 23), ia mencoba mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Sedangkan di Indonesia pemaknaan kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 1 ayat 1, yakni Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu menyumbangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Bahril, 2017; 14).



Berdasarkan uraian-uraian di atas, yang dapat digaris bawahi bahwa kesejahteraan sosial telah ditempatkan sebagai indikator dari kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, apabila dalam suatu negara masalah kesejahteraan sosial ini tidak dapat terwujud, maka dapat dikatakan sebagai kegagalan suatu pemerintahan negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional.

Kesejahteraan biasanya tidak akan terpisah dari fenomena kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu isu yang seringkali diwacanakan. Pasalnya fenomena sosial ini dapat berdampak pada munculnya beragam bentuk masalah sosial lainnya karena dampak kemiskinan bersifat menyebar terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan keterbatasan dalam mencari kebutuhan hidup, kesulitan memiliki hidup layak seperti mutu Pendidikan yang rendah, pelayanan kesehatan yang kurang, dan semua serba terbatas. Kemiskinan tidak hanya dibatasi oleh kemampuan ekonomi, namun juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani hidup yang bermartabat.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki seseorang karena kemiskinan telah membatasi hak rakyat atau ruang gerak rakyat dalam mendapatkan pendidikan yang layak, mendapat pekerjaan yang cukup baik, mengakses kesehatan yang terjamin, sehingga mereka hidup dalam ketidakberdayaan. Dengan situasi yang serba terbatas ini kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian, termasuk Indonesia. Sebenarnya dalam konsep kemiskinan sendiri

tidak pernah membahas tentang bagaimana menghapus kemiskinan namun kemiskinan dapat direduksi dan diminimalisir agar kehidupan lebih sejahtera dapat diraih.

Dewasa ini fakta telah membuktikan bahwa kemiskinan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan dan menjadi momok kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia termasuk Karesidenan Madiun khususnya Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya agar masyarakatnya sejahtera.

Pada dasarnya usaha pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga semua pihak. Karena kemiskinan sendiri adalah *ornament* dunia yang tidak mungkin dapat dibebaskan seperti pembebasan buta huruf. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sebuah instansi pemerintahan dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan diperlukan sebuah strategi yang tepat. Salah satu aspek terpenting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan yakni tersedianya data kemiskinan yang cukup akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen yang kuat untuk pemerintah saat pengambilan

kebijakan dalam mengfokuskan kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan antar daerah dalam waktu tertentu, serta menentukan target penduduk miskin untuk memperbaiki kondisi mereka.

Salah satu model perhitungan kemiskinan yang mayoritas digunakan banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua acara. Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin Badan Statistik (BPS) menggunakan Data Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas) dengan menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kedua, melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSEP) tahun 2005 yang kemudian digunakan untuk menentukan SDM penerima Bantuan sosial yang memuat informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima bantuan dan lokasi tempat tinggalnya (Tirani, 2017; 2).

Permasalahan strategis di Pemerintahan Karesidenan Madiun khususnya di Kabupaten Ngawi, tidak jauh berbeda dengan permasalahan kemiskinan di tingkat provinsi maupun pemerintahan tingkat pusat yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Berikut tabel persentase tingkat kemiskinan yang ada di Karesidenan Madiun.

**Tabel 1.**  
**Persentase Tingkat Kemiskinan Se-Karesiden Madiun**  
**Tahun 2015-2019**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Se-Karesidenan Madiun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Madiun	12,54	12,69	12,28	11,42	10,54
2	Ngawi	15,61	15,27	14,91	14,83	14,39
3	Ponorogo	11,91	11,75	11,39	10,39	9,64
4	Magetan	11,35	11,03	10,48	10,31	9,61
5	Pacitan	16,68	15,49	15,42	14,19	13,67
6	Kota Madiun	4,89	5,16	4,94	4,49	4,35

Sumber: *www.bps.go.id*

Dari tabel tersebut di atas terlihat persentase penduduk miskin di Karesidenan Madiun dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini yakni selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Meskipun tingkat kemiskinan di Karesidenan Madiun cenderung mengalami penurunan dari mulai Kabupaten Madiun 12,54%-10,54%, Kabupaten Ngawi 15,61%-14,39%, Kabupaten Ponorogo 11,91%-9,64%, Kabupaten Magetan 11,35%-9,61%, Kabupaten Pacitan 16,68%-13,67%, dan Kota Madiun 4,89%-4,35%, namun jumlah tersebut secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu pemerintah di Karesidenan Madiun memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan tergolong masih rendah.

Dari hasil persentase di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Ngawi selama kurun waktu lima tahun terakhir telah menempati posisi

paling atas dengan tingkat persentase kemiskinan tertinggi se-Karesidenan Madiun setiap tahunnya yakni pada akhir tahun 2019 persentase Kabupaten Ngawi sebesar 14,39%. Selain itu dengan menilik persentase kemiskinan di Kabupaten Ngawi yang menempati posisi paling tinggi hal ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Ngawi juga sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui data BPS, pada tahun 2019 tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Kabupaten Ngawi sebesar 0,72% dan 2,56% yakni rata-rata  $\pm 0,5\%$  lebih tinggi dari pada kabupaten atau kota lainnya. Maka dari itu untuk mengatasi hal ini pemerintah selalu mengupayakan agar kemiskinan dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi selama ini juga mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai bentuk upaya melalui program-program yang dijalanannya. Program-program tersebut yakni KUBE (Kelompok Usaha Bersama), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, Rehabilitasi untuk Lansia, Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial Permakanan untuk Disabilitas terlantar, Bantuan Sosial Alat Mobilitas untuk Disabilitas, Bantuan Sosial Permakanan Lansia, Bantuan Iuran Kesehatan Nasional. Di antara program-program tersebut intervensinya berupa bantuan, pelatihan, pembinaan, dan panti. Sedangkan sasaran dari masing-masing program adalah untuk masyarakat yang ada di data miskin dan khusus untuk rehabilitasi anak ditargetkan bagi anak punk jalanan atau yang terlantar di jalan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah mengadakan sebuah program baru untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk rumah tangga sangat miskin yang sebelumnya dikenal dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Perlindungan Sosial ini juga dikenal di dunia Internasional sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Kusumawati, 2019;6).

Alasan mengapa PKH ini dikatakan sebagai bantuan bersyarat adalah karena dalam pelaksanaannya ada syarat khusus saat menjadi anggota KPM PKH yakni adanya sebuah kontrak untuk berkomitmen seperti halnya komitmen terhadap masalah kesehatan dan Pendidikan, ada juga sebuah kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bersama dengan pendamping dan kegiatan pendampingan satu bulan sekali oleh para pendamping masing-masing kelompok KPM.

Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin atau yang biasa disingkat menjadi RTSM (Puspaningsih, 2016; 2). Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan

memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, Pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer berkelanjutan. PKH yang mewajibkan RTSM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan Pendidikan (Kusumawati, 2019; 7).

Program Keluarga Harapan (PKH) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini diharapkan dapat membantu membangun masa depan anak yang sehat dan cerdas. Selain itu juga untuk mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu melahirkan.

Namun harapan-harapan di atas dapat tercapai ketika program ini berjalan dengan baik. Sedangkan realitasnya yang terjadi di lapangan banyak sekali yang tidak tersalurkan tepat sasaran sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah

dalam membuat program ini belum tercapai. oleh karena itu, perlu adanya strategi yang efektif agar program pengentasan kemiskinan tersebut dapat tercapai sesuai tujuan.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini awal mula diterapkan di Indonesia mulai tahun 2007. Pada awal 2007 PKH baru diterapkan di 7 kabupaten sampai dengan tahun 2018 PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512

Kabupaten/Kota dan 7.214 Kecamatan. Secara teknis PKH ini berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun di daerah. Sedangkan pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. (Astari, 2017; 134).

Dalam sistem pemerintahan daerah, PKH dijalankan oleh Dinas Sosial. Sejak 2007 awal kebijakan bantuan PKH direalisasikan, Dinas Sosial Ngawi pada saat itu baru menjalankan program ini pada 7 kecamatan saja dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Pada saat itu jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH hanya sekitar 7000-an hingga pada akhirnya pada tahun 2014 sudah mulai dijalankan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Ngawi yakni 18 sampai 19 kecamatan dengan jumlah KPM PKH sebanyak  $\pm 14.190$  dan kemudian semakin lama PKH dijalankan, untuk Kabupaten Ngawi mengalami penambahan jatah jumlah KPM yang cukup signifikan dari pemerintah. Sedangkan untuk masing-masing KPM PKH menerima bantuan uang tunai minimal Rp. 75.000/bulan dan maksimal Rp. 250.000/bulan tergantung komponen yang dimiliki sedangkan untuk metode pencairan bantuan diberikan empat bulan sekali. Berikut ini data perkembangan jumlah KPM PKH sejak tahun 2007 hingga 2018;

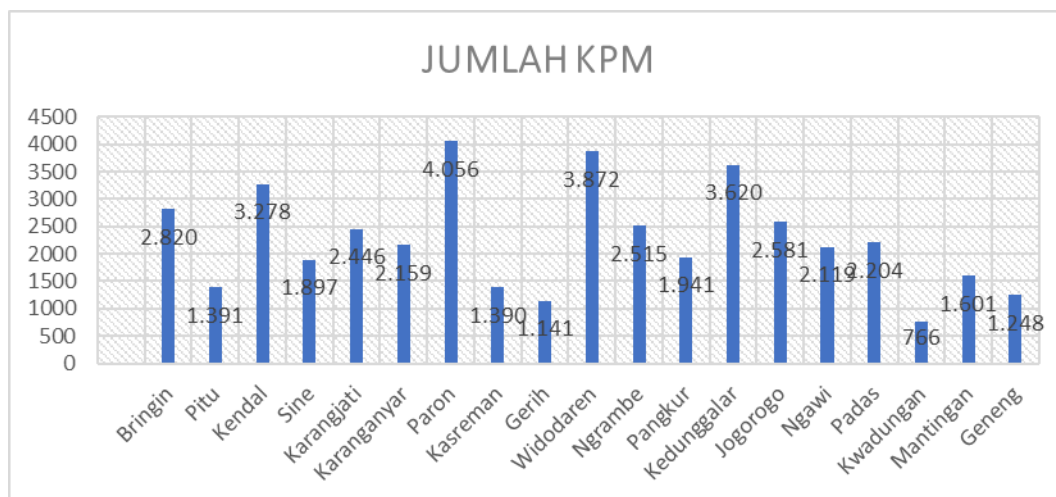


**Tabel 2. Jumlah KPM PKH Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2018**

TAHUN	KECAMATAN	TAHAP	JML KPM		TAHUN	KECAMATAN	TAHAP	JML KPM
2007	9	1	7.273		2013	13	1	8281
		2	7.220			15	2	9735
		3	7.220				3	9683
						18	4	14197
2008	9	1	7.081		2014	18	1	12958
		2	6.841				2	12.954
		3	6.786				3	12.938
						19	4	13.767
2009	13	1	9.548		2015	19	1	13.581
		2	9.546				2	13.536
		3	9.279				3	13.521
							4	14.697
2010	13	1	9.193		2016	19	1	14.430
		2	9.169				2	14.351
		3	8.824				3	14.314
		4	9.316				4	30.213
2011	13	1	9.272		2017	19	1	29.565
		2	9.223				2	28.872
		3	9.192				3	28.893
		4	8.764				4	28.320
2012	13	1	8.724		2018	19	1	47.913
		2	8.700				2	47726
		3	8.674				3	47596
		4	8.312				4	45894

Pada tahun 2019 lalu jumlah KPM PKH se-Kabupaten Ngawi telah mencapai angka 44.475 KPM, dan selama kurun waktu satu tahun kecamatan yang memiliki jumlah KPM terbanyak adalah Kecamatan Paron. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang masuk data BDT katagori layak menerima bantuan PKH lebih banyak, dengan demikian bisa dikatakan Paron masih sangat rentan terhadap kemiskinan. Berikut ini data jumlah KPM PKH tahun 2019:

**Gambar 1. Jumlah KPM PKH Perkecamatan Di Kabupaten Ngawi Tahun 2019**



Sumber: *Dokumen Dinas Sosial Ngawi*

PKH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dikatakan sudah cukup baik. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi juga sudah menjalankan program ini sesuai dengan proses dan mekanisme alur kerja PKH yakni mulai dari penetapan calon penerima PKH, Dinas Sosial membentuk Pelaksana PKH tingkat kabupaten-kecamatan, pembentukan tim koordinasi teknis PKH tingkat kabupaten dan kecamatan, menyediakan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan PKH, melakukan sosialisasi, kegiatan validasi, penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan sampai pada penyaluran bantuan PKH.

Dalam implementasinya, PKH di Kabupaten Ngawi juga mengalami beberapa masalah diantaranya: saat kegiatan pengisian materi saat pertemuan dengan pendamping banyak anggota penerima manfaat PKH yang tidak hadir, penerima pemanfaatan bantuan PKH kurang tepat sasaran, pencairan bantuan PKH telat dan kecemburuan sosial karena masing-masing keluarga jumlah

bantuan tunai PKH berbeda-beda. Hal seperti ini tentunya akan menghambat misi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi sehingga kesejahteraan masyarakat miskin akan terabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 04 November 2019 bersama Bapak Drs. Tripujo Handono, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang menjadi momok di masyarakat adalah masalah penyaluran bantuan PKH kurang tepat sasaran seperti halnya KPM PKH ternyata sudah mampu atau mendapat warisan atau hibahan sehingga mendadak kaya, kemudian ada juga karena mungkin saja kalau untuk lansia itu ternyata anaknya sudah jadi pengusaha, dsb. Ia juga menjelaskan bahwa se-Karesidenan Madiun menurut data BPS Kabupaten Ngawi memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yakni kurang lebih 119.430 orang. Sedangkan dalam pengimplementasian PKH oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi hanya mendapatkan jatah 10% dari jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Ngawi. Dengan demikian ketepatan sasaran penerima bantuan sangat penting untuk Ngawi dalam upaya menyejahterakan rakyatnya.

Drs. Tripujo juga menambahkan masalah ketidak tepat sasaran setiap bantuan pemerintah khususnya PKH disebabkan karena adanya kesalahan pada data BDT yang tersedia. Kesalahan daftar BDT itu dapat disebabkan karena dari pemerintah desa tidak melakukan sensus ulang ataupun mungkin saja Pemerintah Desa sudah melakukan sensus lagi namun itu hanya sebagai formalitas saja dan mereka tidak melakukan *updating* terhadap hasil data yang telah diperoleh saat sensus ulang, jadi data yang terdapat pada BDT adalah tetap data yang lama karena biasanya mereka tidak ingin repot-repot untuk meng*updatenya* sehingga

data yang dimasukkan banyak yang tidak valid dengan kondisi masyarakatnya. Padahal dalam tatanan kehidupan manusia, roda kehidupan seseorang akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu sehingga bisa jadi masyarakat yang miskin atau warga yang masuk BDT juga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik pada periode masa berikutnya begitu pula sebaliknya.

Berbicara mengenai PKH maka tidak akan terlepas dari Namanya BDT. BDT merupakan kepanjangan dari Basis Data Terpadu. BDT adalah data acuan warga miskin yang masuk dalam katagori penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah termasuk juga sebagai acuan untuk menetapkan siapa saja KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH. BDT diambil pada saat sensus Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya data dikelola oleh Kementerian Sosial dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi yang membutuhkan data tersebut. Karena semua instansi mengambil data dari BDT, maka warga miskin yang tidak masuk dalam BDT tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait warga miskin. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sensus yang dilakukan tingkat desa sangat penting bagi pemerintah desa untuk melakukan *updating* sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sehingga berbagai bantuan bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.

Program Bantuan Sosial PKH ini dalam prosedur pengambilan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengambil data BDT yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial Pusat yang mana data itu diambil dari BPS pusat dan dengan sebuah catatan bahwa data keluarga yang ada dalam BDT tersebut memiliki salah satu komponen diantaranya yakni; ibu hamil, balita, anak

SD/ sederajat, anak SMP/ sederajat, anak SMA/ sederajat, dan mulai tahun 2016 atau 2017 ditambahkan lagi adanya komponen lansia, dan disabilitas. Kemudian data dari Kemensos Pusat itu diturunkan kepada Dinas Sosial selaku pelaksana PKH. Setelah data calon penerima PKH diberikan pada Dinas Sosial maka data tersebut masih akan difilter siapa saja yang sekiranya sudah tidak layak menerima bantuan PKH sebelum dilanjutkan pada proses verifikasi dan validasi.

Dinas Sosial sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan harus memiliki strategi komunikasi yang baik agar mampu bersinergi dengan masyarakat. Apalagi dengan kondisi seperti yang dipaparkan di atas, dengan permasalahan ketidak validan BDT ini akan kurang efektif jika Dinas Sosial Ngawi hanya menghimbau pemerintah desa untuk memperbaiki BDT melalui Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Ngawi harus membuat perencanaan lain terkait strategi komunikasi yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut.

Strategi komunikasi pada umumnya bisa diaplikasikan untuk banyak hal bukan hanya untuk komunikasi itu sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat. Komunikasi merupakan bagian yang erat hubungannya dengan sisi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dinas Sosial sebagai pelaksana program pengentasan kemiskinan harus memiliki strategi komunikasi yang efektif guna mencapai tujuan pengambilan kebijakan suatu program yang mana strategi tersebut mampu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melepaskan diri dari masalah yang dihadapi. Dengan demikian kesejahteraan akan dapat terwujud.

Peneliti memilih Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai variabel penelitian karena berdasarkan tabel persentase penduduk miskin kabupaten se-Karesidenan Madiun melalui data BPS yang telah dipaparkan sebelumnya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. Bahkan dalam sebuah penelitian lain sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2017 lalu oleh Rizky Yanuar Saputra dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Enam Kota Sekaresidenan Madiun Tahun 2010-2015”* juga menunjukkan bahwa persentase kemiskinan kabupaten Se-karesidenan Madiun baik dari tingkat keparahan dan kedalamannya tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi juga menempati posisi paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi selalu menempati posisi paling rendah dibandingkan daerah kabupaten/kota lain di Karesidenan Madiun. Oleh karena itu, dengan adanya Program Keluarga Harapan yang disediakan pemerintah ini, strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam memanfaatkan program ini agar dapat meningkatkan masalah kesejahteraan masyarakat miskin yang sangat rendah di Kabupaten Ngawi sangat berpengaruh untuk mengentaskan masyarakat Ngawi dari belenggu kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang kemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)”*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Menurut latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Ngawi memiliki tingkat persentase kemiskinan paling tinggi se- Karesidenan Madiun selama lima tahun terakhir sejak 2015-2019 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak se Karesidenan Madiun pada tahun 2019 yaitu kurang lebih ada 119.430 orang miskin.
2. Saat kegiatan pengisian materi untuk menunjang sumber daya masyarakat ketika pertemuan dengan pendamping (kegiatan pendampingan) banyak anggota penerima manfaat PKH yang tidak hadir.
3. Pencairan bantuan PKH telat dan kecemburuan sosial karena masing-masing keluarga jumlah bantuan tunai PKH berbeda-beda
4. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran sehingga kesejahteraan tidak dapat dicapai sesuai tujuan pembuatan kebijakan PKH.
5. BDT (Basis Data Terpadu) seringkali tidak valid dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga menghambat misi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan. Penelitian ini hanya dibatasi pada strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam menyalurkan bantuan

PKH agar tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana strategi komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?”

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

##### **b. Manfaat Penelitian**

###### **1. Manfaat Teoritis**

- Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengalaman dan menjadi referensi untuk menambah wawasan mengenai strategi komunikasi secara praktik.
- Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH).



## 2. Manfaat Praktis

- Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca yang ingin mengetahui strategi komunikasi yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
- Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi Dinas Sosial lainnya mengenai strategi komunikasi yang digunakan Dinas Sosial Ngawi dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Strategi Komunikasi**

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah proses komunikasi arah sasaran komunikasi adalah berorientasi pada efektivitas. Untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif diperlukan adanya strategi operasional tertentu. Oleh karena itu penulis akan memaparkan terlebih dahulu hal yang mendasari penelitian ini agar bisa mendapatkan gambaran mengenai pengertian strategi dalam hubungannya dengan komunikasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Arifin (1994:10) bahwa strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, jadi merumuskan suatu strategi komunikasi berarti memperhitungkan situasi dan kondisi (waktu dan ruang) yang dihadapi mapun yang akan dihadapi di masa mendatang untuk mencapai efektivitas.

Selain itu pakar komunikasi yang lainnya yaitu Effendy (2007 :32).juga mengemukakan bahwa trategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi agar mencapai tujuan tersebut strategi harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi merupakan paduan

dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penerapan strategi komunikasi hendaknya kita harus mengetahui tujuan sentral strategi komunikasi itu. R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, *Techniques For Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: *To secure understanding* (Memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya), *To establish acceptance* (Andai kata komunikan sudah mengerti dan menerima maka ia perlu dibina), dan *To motivate action* (pada akhirnya kegiatan itu dimotivasikan).

Penelaahan mengenai berlangsungnya sebuah komunikasi tidak bisa lepas dari pengkajian terhadap pertautan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dalam proses komunikasi. Arifin Anwar (1984:87) menyatakan bahwa elemen yang harus diperhatikan didalam merumuskan strategi komunikasi adalah pengenalan khalayak, pesan, metode, media, dan komunikator. Dengan begitu untuk mantapnya perumusan strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan Harold Laswell "Who Says What Which What Channel To Whom With What Effect?", maksudnya yaitu: Who? (Siapakah komunikatornya), Says what? (pesan apa yang dinyatakannya), In which channel? (media apa yang digunakannya), To Whom? (siapa komunikannya), dan With what effect? (efek apa yang diharapkan).

Komunikasi merupakan proses yang rumit. Maka dari itu saat menyusun strategi komunikasi selain memperhatikan keterpautan komponen-komponenya juga perlu mempertimbangkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

a. Pengenalan Khalayak

Sebelum kita melancarkan komunikasi kita harus tahu siapa saja yang akan menjadi sasaran komunikasi kita itu. Sehingga dalam strategi komunikasi, melakukan identifikasi khalayak sasaran adalah hal penting yang perlu dilakukan oleh seorang komunikator.

Harus diketahui bahwa khalayak tidak hanya berperan pasif namun juga menjadi bagian aktif. sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi hubungan tapi juga dapat saling mempengaruhi. Sifat khalayak yang aktif ini mengharuskan seorang komunikator memahami khalayak terlebih dahulu. Apapun tujuannya, metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri komunikan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- *Kerangka referensi*

Kerangka referensi seseorang dalam dirinya dibentuk melalui hasil dari paduan pengalaman, tingkat pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dll. Jadi setiap orang akan memiliki kerangka referensi yang berbeda-beda sesuai dengan taraf hidup mereka. Dengan demikian pesan yang disampaikan kepada komunikan harus disesuaikan dengan kerangka referensi khalayaknya.

- *Situasi dan kondisi*

Yang dimaksudkan situasi disini adalah situasi komunikasi ketika khalayak sasaran (komunikan) akan menerima pesan yang kita sampaikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kondisi disini adalah *state of personality* komunikan, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat ia menerima pesan. Komunikasi tidak akan efektif jika komunikan dalam keadaan bingung, marah, sedih, sakit, atau lapar.

b. Penyusunan Pesan

Setelah khalayak dan situasinya telah diketahui dengan jelas maka langkah selanjutnya yaitu menyusun pesan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pesan adalah menentukan tema dan materi. Syarat utama untuk penyusunan pesan adalah pesan yang akan disampaikan mampu membangkitkan perhatian. Hal ini sesuai dengan konsep komunikasi yang dinamakan AIDDA, singkatan dari Attention (perhatian) Interest (minat), Desire (Hasrat), Decision (Keputusan), dan Action (kegiatan). AIDDA itu sering juga disebut *A-A Prosedure (From Attention To Action Procedure)*, yang artinya membangkitkan perhatian untuk menggerakkan seseorang melakukan suatu kegiatan sesuai tujuan yang dirumuskan.

c. Menetapkan Metode

Setelah mengenali khalayak dan melakukan penyusunan pesan dengan sedemikian rupa maka tahap selanjutnya adalah menentukan metode, saat menentukan sebuah metode harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan

khalayak, fasilitas dan biaya. Anwar Arifin mengemukakan metode komunikasi yang efektif, sebagai berikut:

1) Redudency

Redudency adalah proses mempengaruhi khalayak dengan cara mengulang-ngulang pesan yang disampaikan untuk menarik fokus khalayak.

2) Canalizing

Metode ini adalah metode pemahaman terhadap khalayak. Oleh karena itu pada hakekatnya kelompok/khalayak terbentuk dari sebuah keakraban yang kuat dan tujuan yang tentunya sama, maka akan sulit menanamkan pengaruh, untuk itu situasi kelompok terpecah akan memungkinkan sebuah pesan diterima dengan baik.

3) Informatif

Informatif yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara memberikan penerangan. Penerangan disini maksudnya adalah penyampaian pesan apa adanya atau suatu keadaan yang sesungguhnya dengan fakta-fakta dan data-data serta pendapat-pendapat yang benar. Sehingga dengan demikian pesan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

4) Persuasive

Persuasive berarti mempengaruhi khalayak dengan membujuk. Dalam hal ini komunikator harus mampu menggugah pikiran dan perasaan khalayak. Metode ini tidak memberikan kesempatan pada khalayak untuk menjadi kritis atau bisa dikatakan sebagai metode sugesti.

#### 5) Edukatif

Edukatif merupakan metode yang sangat umum, metode ini memberikan wawasan terkait fakta-fakta, pengalaman dan sebagainya kepada khalayak yang intinya mendidik.

#### 6) Cursive

Metode ini adalah cara mempengaruhi khalayak dengan memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa untuk menerima gagasan-gagasan yang disampaikan. Oleh karena itu dalam penyampaian gagasan juga berisi ancaman-ancaman.

#### d. Pemilihan media komunikasi

Media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Media banyak jenisnya yakni ada yang media cetak maupun elektronik. Namun efektivitas dari masing-masing media itu sendiri juga berbeda. Di dalam ilmu komunikasi dikenal dengan komunikasi langsung dan media massa. Jika sasarannya hanya terdiri dari beberapa orang saja dan lokasinya dapat terjangkau maka digunakan komunikasi langsung atau tatap muka, termasuk jika sasarannya internal public bisa menggunakan pertemuan-pertemuan, sedangkan

jika sasarannya orang banyak dan tersebar di mana-mana maka bisa memanfaatkan media massa.

e. Peranan Komunikator dalam komunikasi

Dalam penyampaian pesan diperlukan komunikator. Adanya komunikator merupakan unsur penting dan dominan bagi keseluruhan proses komunikasi yang efektif. Komunikator dianggap berhasil jika mampu mengubah opini, sikap dan perilaku komunikannya. Menurut Onong Uchjana Efendy (2007:38) ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan komunikator untuk melancarkan komunikasinya, yaitu:

- Daya tarik sumber

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi akan mampu mengubah opini, sikap dan perilaku seorang komunikan ketika ia mampu menarik perhatian dengan membuat pihak komunikan merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikan bersedia taat terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator.

- Kredibilitas sumber

Faktor kedua yang menyebabkan komunikasi berhasil adalah adanya kepercayaan komunikan terhadap komunikatornya. Kepercayaan itu tergantung pada bagaimana kemampuan dan ketrampilan seorang komunikator dalam menyampaikan pesan ataupun bagaimana kepribadiannya serta keakraban yang terjalin antara komunikan dengan komunikator.

Berdasarkan kedua faktor di atas, seorang komunikator dalam menghadapi komunikannya diharuskan mampu bersikap empatik, yaitu kemampuan seseorang



untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Dengan perkataan lain komunikator mampu merasakan apa yang dirasakan komunikan saat berkomunikasi dengannya.

## **2. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari Bahasa Sansekerta “Catera” yang memiliki arti payung. Dalam konteks ini, arti kesejahteraan yang terkandung dalam istilah “Catera” ini berarti orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya tenteram, baik lahir maupun batin (Kusumawati, 2019; 30)

Secara terminologi Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No 11, 2009; Pasal 1 ayat 1).

Sedangkan Midgley John (1997: 5) melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi atau situasi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan (Adi, 2013; 23). Penjabaran yang dapat menunjang definisi Midgley tentang kesejahteraan sosial ini, DiNitto (1995: 2) menggambarkan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kebijakan

kesejahteraan Sosial Meliputi hamper berbagai macam hal yang dilakukan mulai dari perpajakan, pertahanan nasional, konservasi energi, hingga pelayanan kesehatan, perumahan, dan bantuan sosial.

Arthur Dunham juga mendefinisikan kesejahteraan social merupakan kegiatan-kegiatan terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial (Bahril, 2017; 14).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

### **3. Teori Keluarga**

Menurut Departemen Sosial dalam Agus Sjafari (2014: 37) Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah tempat penting yang menjadi awal bagi seorang anak memiliki dasar-dasar dalam membentuk kemampuan agar kelak menjadi orang yang berhasil di masyarakat. Selain itu keluarga juga merupakan pranata sosial yang paling penting dalam kehidupan sosial di Negara manapun. Karena mayoritas masyarakat banyak menghabiskan waktunya dalam sehari bersama keluarga dibandingkan dengan aktivitas lainnya seperti di tempat kerja atau sekolah (Zega, 2017; 15)

Zanden dalam Agus Sjafari (2015: 37) mengemukakan bahwa keluarga memiliki fungsi sebagai wahana terjadinya sosialisasi antara individu dengan warga yang lebih besar. Sama halnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Kesejahteraan sebuah keluarga dipengaruhi oleh beberapa factor yakni dari segi ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, kehidupan beragama, dan factor kepastian hukum (Syarief dan Hartono) dalam Agus Sjafari (2015: 47).

Deacon dan Firebaugh dalam Iskandar (2012: 16) menyatakan fungsi keluarga adalah bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan anggota-anggotanya. Maka dari itu untuk hal tersebut perlu tersedia hal-hal sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan Kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial.
- Kebutuhan Pendidikan formal, informal, non formal untuk pengembangan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual.

Dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kesempatan untuk berkembang lebih luas dapat dibangun. Sehingga individu dan keluarga akan mampu menampilkan diri dalam berbagai aspek kehidupan mereka baik dalam aspek budaya, intelektual, dan sosial (Iskandar, 2012: 16) (Zega, 2017; 17)

Pemerintah telah membuat terobosan baru dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat yakni dengan memperhatikan kebutuhan dasar keluarga

melalui sebuah program yang dibawah oleh Kementrian Sosial yakni berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini ditargetkan untuk keluarga khususnya keluarga miskin karena keluarga dianggap sebagai unit yang paling relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Bantuan dana PKH merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dan berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Karena tujuan dari kebijakan PKH ini adalah untuk membantu keluarga miskin pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan SDM untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku yang dapat membawa pada kehidupan yang lebih bermartabat untuk jangka yang lebih panjang.

#### **4. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sering kali hadir di tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima oleh seseorang. namun secara luas kemiskinan juga sebagai kondisi yang oleh serba kekurangan; baik dari segi pendidikan, Kesehatan yang buruk dan transportasi yang dibutuhkan masyarakat (Puspaningsih, 2016; 11).

Menurut Khomsan, dkk (2015:11) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi dasar makanan dan bukan makanan (Ngutra, 2017; 4-5). Penyebab utama kemiskinan ini pada dasarnya

karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan keluarga miskin sehingga mereka tidak mempunyai akses yang cukup ke sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat kehidupan mereka layak. Empat faktor lain penyebab kemiskinan menurut Chambers dalam Khomsan, dkk (2015: 3-4) (Muhammad A.H, 2018; 4):

- a) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum.
- b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pada pendapatan.
- c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap orang atau kelompok yang disebabkan karena faktor budaya atau kebiasaan seperti malas, boros, tidak kreatif, dll.
- d) Kemiskinan struktural: situasi kemiskinan karena faktor rendahnya akses terhadap sumber daya.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), supaya tidak terjadi plagiarisme penulis melampirkannya sebagai berikut:

1. Penelitian Oktaviani Tirani yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso” menjelaskan bahwa dalam implementasinya aspek komunikasi tentang pentingnya memanfaatkan bantuan dana PKH belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena banyak masyarakat yang belum paham tentang penggunaan dana yang diberikan sehingga masih perlu pengawasan rutin. Sedangkan dari aspek sumber daya sudah berjalan dengan baik karena rata-rata pendamping PKH lulusan sarjana (S1) bahkan sudah ada yang S2. Dari sikap pelaksana masih belum baik karena belum ada uang operasional untuk para pendamping dan terakhir aspek birokrasi yang sudah berjalan bias dikatakan baik karena proses pencairan dana untuk para peserta PKH sudah sesuai dengan *Standart Operational Procedure (SOP)* yang ada. (Oktavia Tirani, “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso” *Jurnal Katalogis*, 5(6), 2017, h 8).

Perbedaan penelitian tersebut dengan apa yang akan diteliti oleh penulis terdapat pada subyek penelitian yakni Oktavia meneliti di Dinsos Poso sedangkan penulis menilite di Dinsos Ngawi. Selain itu perbedaan itu juga terdapat pada hasil penelitiannya yakni pada skripsi Oktavia Tirani terfokus pada bagaimana implementasi PKH di Dinsos Kabupaten Poso sedangkan penulis akan meneliti bagaimana strategi komunikasi Dinsos Ngawi mengenai cara menyejahterakan masyarakat miskin melalui PKH.

2. Penelitian Mar’atus Sholihah yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Miskin Di Kec Kabat Kab. Banyuwangi” yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Banyuwangi yaitu menjalankan salah satu program dari pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan yakni dengan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). (Mar’atus Sholihah, *“Strategi Komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kec Kabat Kab. Banyuwangi” Skripsi IAIN Jember, 2016, hal 106*)

Perbedaan penelitian Mar’atus Sholihah dengan penelitian yang akan diteliti penulis terletak pada apa yang menjadi fokus penelitian. Pada Skripsi Mar’atus Sholihah terfokus pada mekanisme Dinsosnakertan menjalankan PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana mengatasi masalah tidak tepat sasaran penyaluran PKH untuk mensejahterakan masyarakat miskin oleh Dinsos Ngawi.

3. Penelitian Andi Nurhikmawati yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Tamangapa Kecamatan Menggala” menjelaskan bahwa langkah-langkah komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar pada dasarnya adalah proses yang dilakukan secara tidak langsung. Yakni dengan cara menentukan khalayak, menyusun pesan dengan bantuan Yayasan Pabbata Ummi, menggunakan metode edukasi atau disini Dinas Sosial berperan memonitoring masyarakat miskin agar mereka terarah, dan kemudian terakhir yakni menyeleksi media yang cocok digunakan untuk sebuah publikasi.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang upaya Dinas Sosial untuk memberdayakan masyarakatnya. (*Nurhikmawati Andi, “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Tamangapa Kecamatan Menggala” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2015, h 74.*)

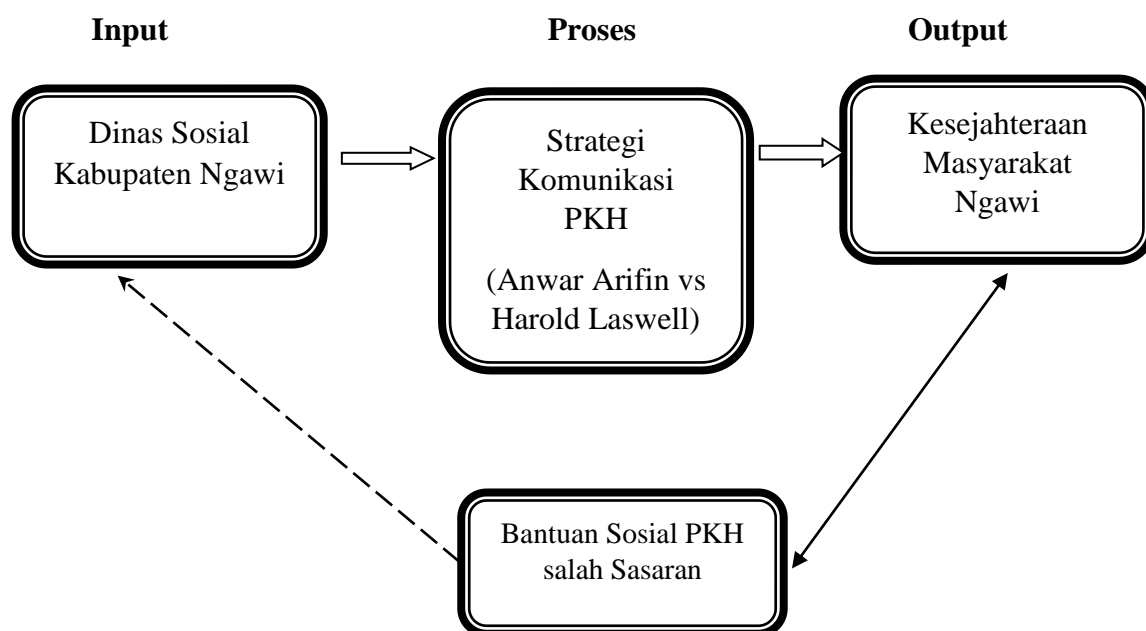
Perbedaan hasil penelitian dari pembuatan skripsi ini dengan Skripsi Andi Nurhikmawati adalah terletak pada objek yang diteliti. Pada Skripsi Andi, ia meneliti Strategi Komunikasi Dinsos Makassar tentang Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEF (Usaha Ekonomi Produktif) untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan objek penelitian dari penulis adalah Strategi Komunikasi pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan Dinsos Ngawi untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi.

### **C. Kerangka Pikir**

Penyusunan kerangka berpikir ini menjelaskan mengenai proses berpikir peneliti dalam melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam Mengatasi Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).



**Gambar 2. Kerangka pikir strategi komunikasi Dinas Sosial mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin**



Dari Bagan Gambar 1. Inputnya adalah Masalah kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi yang salah satunya disebabkan karena bantuan sosial PKH salah sasaran. Proses yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi dengan melalui PKH dilakukan dengan menggunakan Teori strategi komunikasi Anwar Arifin yang dipertautkan dengan rumusan komponen komunikasi oleh Lasswell (Effendy, 2007:35)

Dari tahapan tersebut akan menghasilkan output berupa keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam menyejahterakan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diimplementasikan dengan strategi komunikasi yang baik dan efektif sehingga tepat sasaran.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang beralamat Jl. Soekowati No.11, Ds. Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan yakni pada bulan Agustus hingga September 2020 dengan fokus utama terhadap tiga hal, antara lain;

1. Penerapan program kesejahteraan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin melalui PKH di Kabupaten Ngawi.
2. Faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin Kabupaten Ngawi.
3. Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan penyaluran hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka. Namun penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi (Bahril, 2017; 28).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*);

disebut juga sebagai metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2013; 8).

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menyajikan paparan dan mendiskripsikan tentang strategi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui informan utama yaitu individu atau perseorangan dari proses wawancara langsung saat melakukan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Informan dipilih secara purposif yakni dengan melalui pertimbangan tertentu seperti informan merupakan orang-orang yang benar-benar berkompeten di dalamnya. Maksudnya yaitu informan adalah orang yang menguasai masalah, memiliki data, dan dapat memberikan keterangan atau jawaban -jawaban secara akurat. Dalam penelitian ini subyek yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sampel Pendamping PKH. Pada penelitian ini metode pengambilan *sampling* pendamping PKH menggunakan metode *sampling purposive*. *Sampling purposive* merupakan Teknik penentuan sampel

berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga peneliti dapat memiliki data yang benar-benar dibutuhkan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang masih berkaitan dengan materi penelitian (Kusumawati, 2019; 14).

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### 1. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses - proses pengamatan dan mengingat. Dalam penelitian metode observasi digunakan agar pokok permasalahan dapat diteliti secara langsung di Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) (Kusumawati, 2019; 15).

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2013; 227). Mengenai hal ini peneliti akan mewawancarai siapa saja yang benar-benar relevan untuk dimintai penjelasan sesuai apa yang diteliti, terutama dari pihak pengelola

Program Keluarga Harapan di Kantor PKH yang berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Agar wawancara lebih valid, peneliti merekam hasil wawancara untuk dikelola datanya. Sedangkan mekanisme wawancara akan dilakukan dengan cara wawancara terarah yang dilakukan secara individual.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti agar dapat menguatkan argumen peneliti dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan juga sebagai bahan komparasi dari hasil wawancara, (Eny Kusumawati, 2019; 15).

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data yang sudah dengan cara sistematis baik itu yang berasal dari sumber wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013;244).

Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendapat Miles dan Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Ngutra, 2017; 8)

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok penting sehingga mudah dikendalikan (Nurhikmawati, 2015; 45).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian diperoleh dari lapangan terkait seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak diperlukan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah (Nurhikmawati, 2015; 46).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari sebuah penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setiap hipotesis atau kesimpulan sementara akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setelah mengumpulkan banyak data peneliti mulai mencari arti-arti yang jelas. Berbagai kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung salah satunya dengan meninjau kembali hasil temuan data di lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

## **F. Keabsahan Data**

Peneliti dalam menemukan keabsahan temuan tentang strategi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin melalui PKH ini peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Yakni Teknik

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan antara data-data tersebut agar dapat dipersempit tingkat perbedaannya sehingga peneliti dapat memperoleh data yang valid (Nurhikmawati, 2015; 47).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI**

##### **1. Profil Dinas Sosial Ngawi**

Dinas Sosial merupakan suatu instansi pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana otonomi daerah dan pembantuan di bidang Sosial serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sendiri terletak di Jalan Sukowati No. 11 Ngawi, Kelurahan Karangasri, Kecamatan Ngawi.

Disebutkan dalam Peraturan Bupati Ngawi (Perbub) NO. 34 tahun 2019 pasal 4 tentang kewenangan yang dimiliki Dinas sosial, yakni:

- a Rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan dala daerah kabupaten.
- b Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten.
- c Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten.
- d Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- e Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired*



*immunodeficiency syndrom* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

- f Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- g Pendataan dan pengelolaan data fakir-miskin cakupan kabupaten.
- h Penyediaan kebutuhan dasardan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.

## **2. Visi dan Misi Dinas Sosial Ngawi**

Visi Dinas Sosial Ngawi adalah Ngawi sejahtera, berakhlak berbasis pedesaan sebagai barometer Jawa Timur.

Sedangkan Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah:

- a Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- b Meningkatkan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing.
- c Meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang.
- d Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris.
- e Pembaharuan tata kelola Pemerintah Daerah dan Desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui peningkatan kinerja.

- f Meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam suasana yang kondusif..
- g Meningkatkan kondusifitas daerah dalam mendukung, menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan sebagai barometer pembangunan di Jawa Timur.

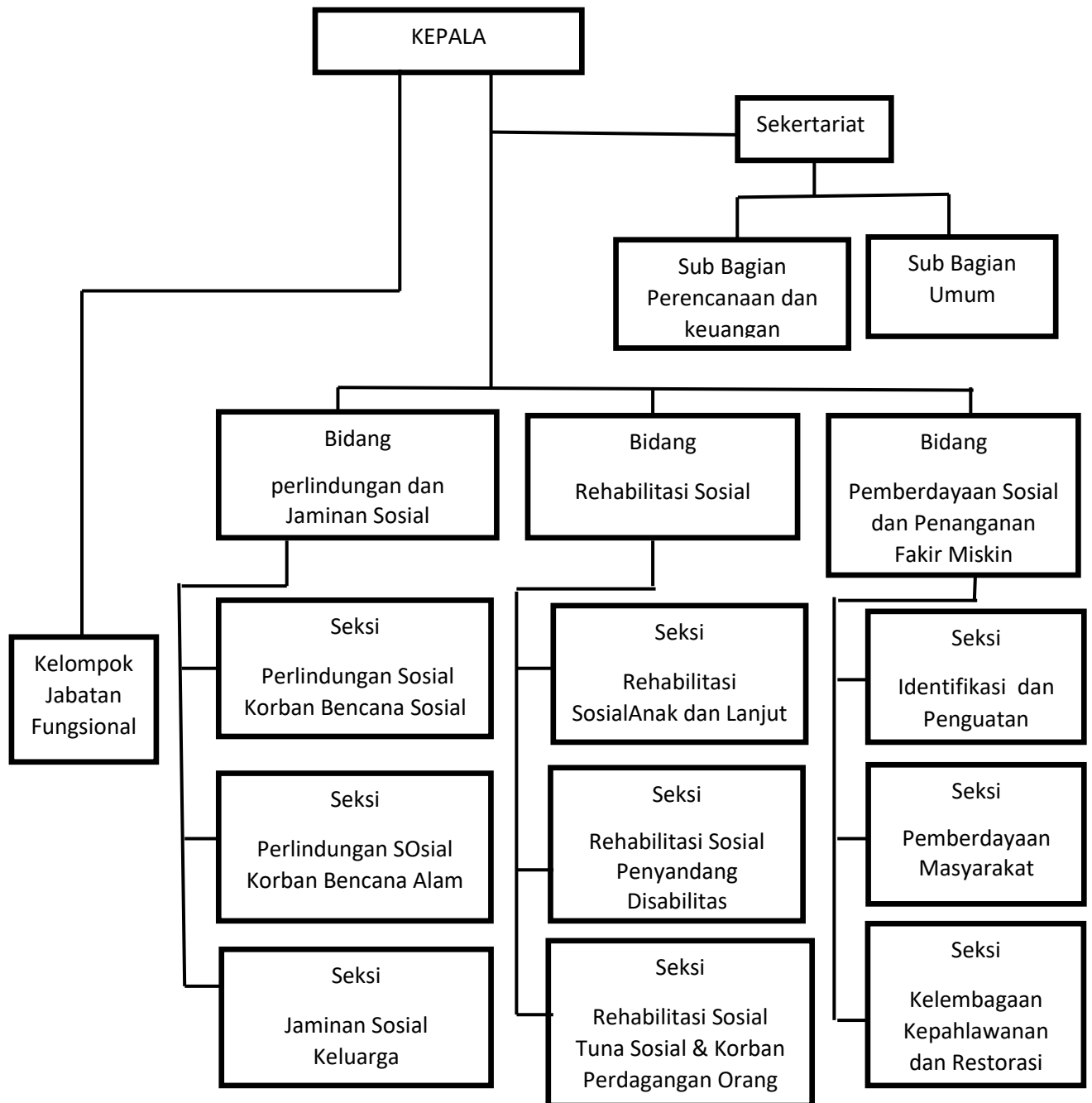
### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Ngawi, maka jabatan structural pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

- a) Kepala DinasSekretariat
  - 1) Sub Bagian Perencanaaan dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum
- b) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- c) Bidang Rehabilitasi Sosial
  - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- d) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- e) Kelompok Pejabat Fungsional

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi



#### **4. Tugas Pokok**

##### **a. Kepala Dinas**

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan Sebagian tugas pokok sesuai kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PERBUB Ngawi No. 34 pasal 4 Tahun 2019, Kepala Dinas Menyelenggarakan:

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial.
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinnnas daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial.

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan berbagai kelompok yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional juga memiliki tugas melaksanakan kegiatan Sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilannya masing-masing.

## **B. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk mempunyai akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Misi besar PKH sendiri adalah untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% yang kemudian pada tahun 2019 Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8%. PKH

juga diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **2. Rancangan Umum Pelaksanaan PKH**

### **a. Pelaksana**

PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
- 2) Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program.
- 3) Kementerian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan negara memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial.
- 4) Kementerian Kesehatan RI, berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan.
- 5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi pendidikan.



- 6) Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara Nasional.
- 7) Kementerian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan data kependudukan KPM PKH.
- 8) Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk Basis Data Terpadu.
- 9) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan Anggaran Pendapatan Nbelanja Negara (APBD).

b. Tujuan

Program Keluarga Harapan Bertujuan:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

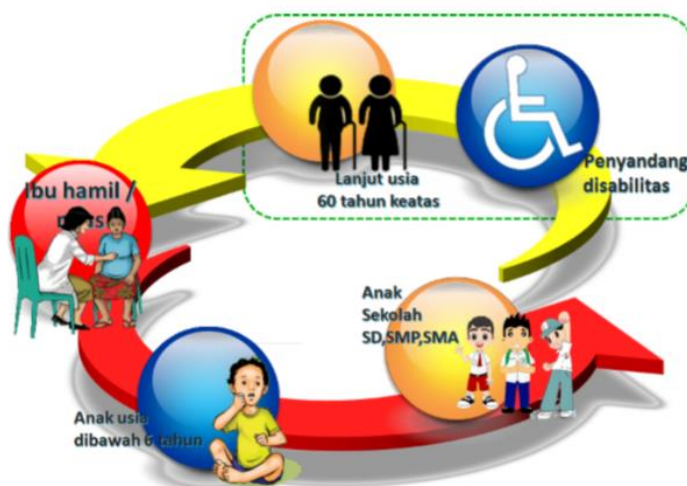
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

c. Kriteria Komponen

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

- 1) Kriteria komponen kesehatan meliputi: ibu hamil, dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun
- 2) Kriteria komponen pendidikan meliputi: anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

**Gambar 4. Komponen PKH**



*Sumber: Buku Pedoman*

*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Kementerian Sosial RI*

d. Hak dan Kewajiban KPM PKH

1) Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a) Menerima bantuan sosial
- b) Pendampingan sosial
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Kewajiban KPM PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- a) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun.
- b) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun

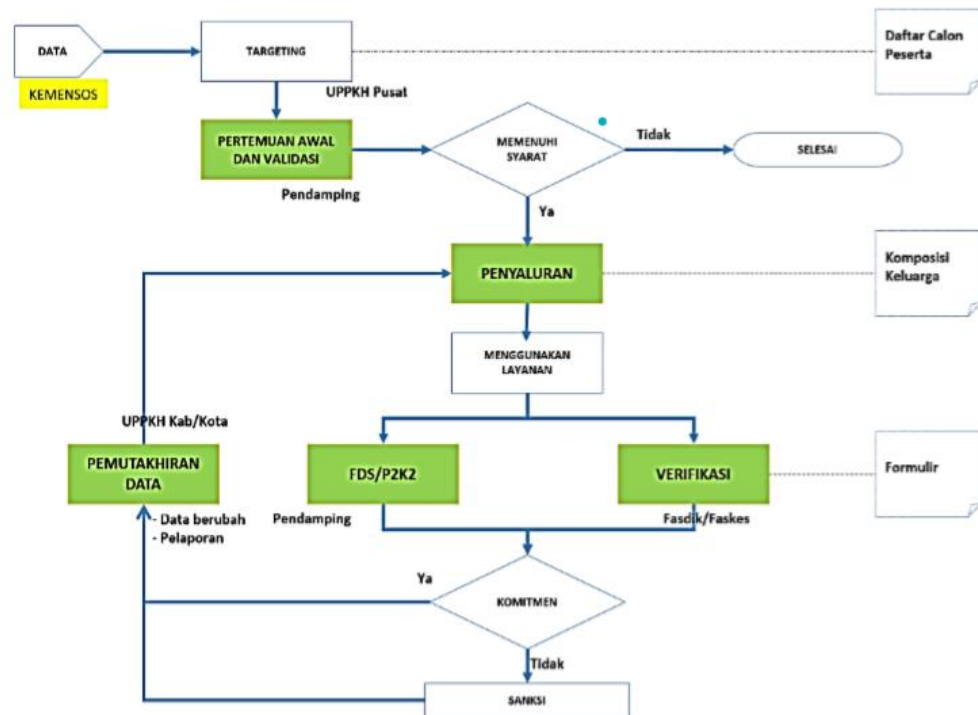
- c) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lansia dari umur 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

**Gambar 5. kewajiban anggota KPM PKH berdasarkan kriteria komponen**



Sumber: *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Kementerian Sosial RI*

## e. Mekanisme Pelaksanaan PKH

**Gambar 6. Alur Pelaksanaan PKH**

Sumber: *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Kementerian Sosial RI*

- 1) **Perencanaan.** Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
- 2) **Penetapan Calon Peserta PKH.** Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah

menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

**3) Persiapan Daerah.** Daerah lokasi perluasan PKH, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a). Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota membentuk Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan
- b). Pembentukan tim koordinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- c). Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten/kota;
- d). Kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di kecamatan;
- e). Melakukan sosialisasi PKH kepada Tim koordinasi kabupaten/kota dan Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

**4) Mengadakan Pertemuan Awal dan Validasi**

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data

awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible*).

**Gambar 7. Pelaksanaan pertemuan Awal**



Sumber: *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Kementerian Sosial RI*

**5) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH .** KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan: (1). hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank; dan/atau (2). hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data. Penetapan

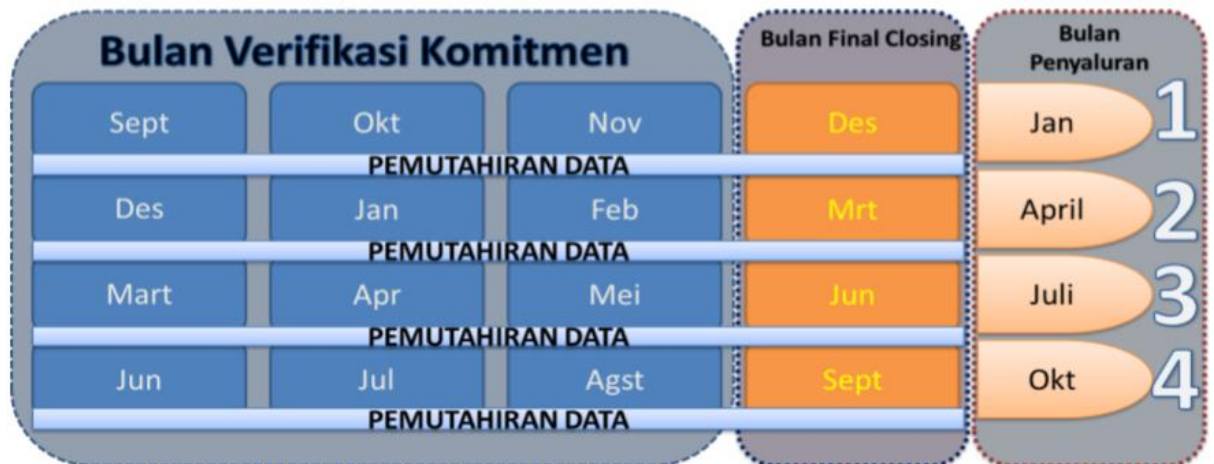
Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

**6) Penyaluran Bantuan.** Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- b) Bantuan sosial PKH terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen.
- c) Bantuan tetap adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d) Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan / atau komponen kesejahteraan sosial.
- e) Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga.
- f) Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- g) Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai.



Gambar 8. Tahap Penyaluran



Sumber: *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Kementerian Sosial RI*

7) **Pendampingiin.** Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH.

8) **Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).** P2K2 atau yang dikenal dengan Family Development Session (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang

disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH terhadap kelompokkelompok dampingannya.

#### **9) Verifikasi komitmen**

**10) Pemutakhiran Data.** Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

### **3. Kelembagaan PKH Di Tingkat Kabupaten**

#### **a) Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota**

- Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota terdiri atas:

Ketua : Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

- Tim Koordinasi Teknis PKH kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
- Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota bertugas:
  - 1) menyusun program dan rencana kegiatan PKH Kabupaten/Kota;
  - 2) komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  - 3) penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
  - 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di kabupaten/kota;
  - 5) melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;

6) menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan;

7) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, kepada pelaksana PKH provinsi dan pelaksana PKH Pusat.

b) Pelaksana PKH Kabupaten/Kota

➤ Pelaksana PKH Kabupaten/Kota adalah Dinas/Instansi Sosial terdiri atas:

Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial

Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

➤ Pelaksana PKH Kabupaten/Kota bertugas:

1) bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;

2) melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;

3) memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;

4) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;

5) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan

6) melaporkan pelaksanaan PKH kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana Pusat dengan tembusan kepada Pelaksana PKH provinsi.

### C. PENYAJIAN DATA

Penelitian ini berjudul Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian bermula dengan adanya program dari pemerintah yang dijalankan oleh Dinas Sosial Ngawi yang dibawah langsung oleh Kementerian Sosial Pusat berupa Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan sejak tahun 2007 di Indonesia hingga sekarang. Setiap bantuan sosial pasti tidak terlepas dari namanya adanya kendala dalam pelaksanaannya. Program bantuan sosial PKH ini bisa dikatakan sudah berjalan cukup lama, pastinya untuk melaksanakan program ini agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintahan. Dengan demikian pastinya selama ini dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Ngawi memiliki berbagai strategi komunikasi yang digunakan agar proses penyaluran bantuan PKH ini berjalan dengan baik sehingga mampu menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti memilih subyek Dinas Sosial Ngawi sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat daerah dengan informan berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Ngawi, guna mengetahui efektivitas strategi yang digunakan Dinsos pada implementasi PKH dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin.
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, guna mengetahui mekanisme secara umum pelaksanaan PKH
3. Koordinator Kabupaten pelaksana PKH atau Operator Kabupaten pelaksana PKH, guna mengetahui implementasi PKH sekaligus

strategi komunikasi yang digunakan agar PKH tersalurkan dengan tepat sasaran

4. Sampel Pendamping, guna mengetahui kegiatan yang dilakukan pendamping dalam menjalankan tugasnya sebagai kepanjangan tangan Dinas Sosial Ngawi.

Pada wawancara yang dilakukan peneliti sudah siap dengan pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber lengkap dengan *Hanphone* sebagai alat untuk merekam jawaban yang mana sudah peneliti jadikan transkrip jawaban atau informasi dari narasumber yang dapat dilihat di lembar lampiran. Selain wawancara dengan informan tersebut, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan dokumentasi yang langsung peneliti dapatkan saat melakukan observasi.

Dinas Sosial merupakan instansi yang bergerak dan bertanggung jawab di bidang sosial, melalui Dinas Sosial seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Ngawi ditangani oleh Dinas Sosial Ngawi, salah satunya adalah masalah kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan Dinas Sosial Ngawi telah menjalankan sebuah program bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sejak 2007 yakni Program Keluarga Harapan.

Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah soal pemenuhan kebutuhan sandang pangan, materi, pendidikan dan kesehatan. Jadi dalam PKH ini difokuskan pada bagaimana menurunkan kemiskinan di masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Seperti yang disampaikan Bu Indah sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial:

*“PKH merupakan salah satu diantara berbagai program pengentasan kemiskinan yang kami jalankan mbak. Namun ada sedikit yang berbeda dari PKH ini, karena PKH adalah bantuan yang bersyarat. Mengapa saya katakan bersyarat? Karena KPM atau biasa dibilang sebagai penerima bansos PKH ini harus memiliki salah satu komponen diantaranya ada ibu hali, balita, anak SD hingga SMA sederajat, lansia, dan disabilitas. Tujuan dari adanya PKH ini juga agar generasi yang akan datang itu bisa berubah menjadi lebih baik, jadi mereka diwajibkan datang ke layanan kesehatan dan pendidikan. Karena kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Orang miskin karena dia tidak berpendidikan, atau dia tidak berpendidikan karena termasuk orang miskin. Makanya pemerintah melalui PKH ini diharapkan agar generasi selanjutnya bisa memiliki kehidupan yang lebih layak. Mekanya di PKH itu ada motto bahwa “saya miskin tapi anak saya tidak boleh miskin”. Harapan dari PKH ini adalah supaya KPM itu ada perubahan pola pikir bahwa pendidikan itu penting kesehatan juga penting. Sehingga tujuan pemerintah melalui bansos PKH ini adalah agar dapat memutus rantai kemiskinan atau kemiskinan turun-temurun.”* (Hasil wawancara dengan Dra. Indah Setyastuti, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 08.40 WIB)

Implementasi sebuah program bantuan sosial tidak bisa dipungkiri pasti akan mengalami beberapa masalah. Untuk mensukseskan Pergam Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ngawi dalam upaya mensejahterakan masyarakat miskin memang tidak mudah. Misalnya saja yang biasanya terjadi tentang penyalurannya. Hal yang sangat umum bahwa saat merealisasikan sebuah bantuan sosial kerap terjadi kesalahan target penerima yang menyebabkan penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa strategi komunikasi yang baik.

Untuk mencapai tujuan dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi melalui implementasi PKH oleh Dinas Sosial Ngawi ini perlu didukung oleh suatu strategi komunikasi yang efektif agar

hal-hal yang disampaikan dalam rangka memberikan pemahaman terkait program PKH ini bisa berjalan dengan baik dan juga benar-benar dapat mewujudkan tujuan pemerintah memberikan bantuan sosial ini.

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, disajikan data-data tentang Strategi Komunikasi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam menyejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi melalui PKH. Dalam implementasian PKH pihak Dinsos Ngawi telah mengalami beberapa kendala diantaranya seperti yang dijelaskan Bu Indah selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga seperti berikut:

*“Biasanya masalah datang dari masyarakat yang notabennya mereka tidak enerima dia ingin menjadi penerima PKH, hal ini biasanya karena ia melihat ada KPM yang menerima PKH padahal jika dilihat mereka sebenarnya sudah mampu. Semacam ini menjadi sorotan sorotan bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena mungkin dulu memang kpm tersebut benar-benar tidak mampu, tapi saat program turun mereka sudah memiliki kehidupan yang layak dan lebih baik. Atau ada pula KPM yang menjadi sorotan masyarakat non kpm karena kpm tersebut terlihat sudah mampu namun pada kenyataannya sebenarnya ia mendapat warisan, atau ikut anak mantunya, dsb. (Hasil wawancara dengan Dra. Indah Setyastuti, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 08.40 WIB)*

Peneliti juga mendapat keterangan yang sama dari informan lain, yakni seperti yang dikatakan oleh Mas Wisnu selaku Operator PKH Dinas Sosial Ngawi berikut ini:

*“Kalau di Ngawi saya rasa relatif lebih slow ya, karena tipikal masyarakat di Ngawi juga cenderung kondusif, sejauh ini mungkin komplain-komplain yang masuk itu ya tentang “ saya kok gak dapet PKH”. ada 2 kemungkinan hal itu terjadi yaitu pertama, dia tidak masuk dalam DTKS dan kemungkinan kedua dia masuk dalam DTKS namun tidak masuk dalam Desil penerima pkh. Desil itu semacam tingkatan ekonomi. Jadi pada DTKS itu ada namanya desil yang terdiri dari beberapa klaster. sedangkan yang masuk*

*menjadi penerima pkh itu yang dari golongan klaster atau desil 4 ke bawah. Jadi yang desilnya di atas 4 itu tidak bisa menjaddi penerima PKH. Yang mempengaruhi desil itu ya tergantung pada updating dari desa itu. “ (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)*

Dengan adanya permasalahan seperti ini pastinya akan membuat kondisi di masyarakat kurang kondusif sehingga menimbulkan adanya provokasi untuk memusuhi pemerintahan karena dianggap pemerintah tidak bisa adil terhadap rakyatnya. Oleh karena itu Dinas Sosial Ngawi perlu memiliki sebuah strategi komunikasi yang baik untuk menangani masalah tersebut.

Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa strategi merupakan upaya atau cara untuk mencapai sebuah hasil yang menyangkut tujuan, sehingga dengan merumuskan sebuah strategi komunikasi berarti sama dengan memperhitungkan kondisi dan situasi yang dihadapi dan yang akan dihadapi di masa mendatang guna mencapai efektivitas.

Dinas Sosial Ngawi dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi melalui PKH ini diawali dengan menjalankan program bantuan sosial ini dengan sebaik mungkin yakni dengan menjadikan para pendamping PKH sebagai tangan panjang dari Dinas Sosial untuk membantu mensukseskan program ini dengan bertatap muka langsung dengan para KPM PKH. Jadi bisa dikatakan ketika adalah permasalahan di masyarakat, misalnya tentang masalah salah sasaran penyaluran bantuan PKH ini model pengaduannya adalah melalui pendamping terlebih dahulu sebelum disampaikan pada pihak Tim Koordinasi



Kabupaten Pelaksana PKH di Dinas Sosial Ngawi. Namun untuk pelaksanaan eksekusi penanganannya juga melibatkan kinerja Pendamping.

Peran Pendamping dalam mewujudkan misi Bantuan Sosial PKH agar terwujud memang sangatlah penting. Oleh karena itu Dinas Sosial Ngawi dalam mengimplementasikan PKH seringkali mengadakan Bimbingan Pemantaban dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penyaluran PKH yang biasanya berkaitan tentang perubahan ataupun penambahan kebijakan-kebijakan baru untuk pelaksanaan PKH agar dapat menangani segala permasalahan mendatang ataupun yang sedang dihadapi yang bisa dikatakan sebagai bimbingan mengenai strategi yang akan dijalankan Dinas Sosial Ngawi dengan bersinergi bersama para pendamping agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik. Sehingga PKH benar-benar mampu membantu Pemerintah dalam menangani kemiskinan.

Sebenarnya dalam pelaksanaan PKH pihak Dinas Sosial Ngawi sudah sangat berhati-hati dalam menyalurkan PKH, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa dari sekian ribu calon penerima PKH ada yang lolos dari pengawasan pihak Dinas Sosial. Kehati-hatian Dinas Sosial Ngawi ini bisa kita lihat dari cara mereka melakukan penyeleksian dengan bersinergi bersama pemerintah desa saat *filtering* data seperti keterangan dari Mas Wisnu sebagai berikut:

*“Setiap data bantuan sosial apapun itu mengambil dari DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) yang dulunya disebut BDT. Jadi awal penentuan kpm pkh itu juga diambil dari situ. PKH itu kan ada pendamping ya, nah itu ya kepanjangan tangan dari dinas sosial. fungsi Kontrol sebenarnya ada pada mereka. Misalkan ini ada permasalahan ada calon penerima meskipun dia itu diambil dari data DTKS tadi, kita masih ada filter lagi berupa verifikasi dan validasi nanti kita datang, biasanya sih kita koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Jadi misalkan di desa babadan ada 100 calon penerima nah datanya itu*

*diberikan pada pemerintah desa, jadi filter awal ada di desa, perangkat desa akan mengfilter mana calon penerima yang sekiranya sudah mampu jadi sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Setelah dicoreti oleh pemerintah desa mana saja yang sudah mampu, kita pun juga tidak serta merta kita eksekusi, jadi kita masih mengadakan survei langsung. Biasanya yang kita jadikan parameter itu dua mbak, yakni dari perangkat desa dan ketua kelompok. Jadi setiap pendamping itu membawahi beberapa kelompok, dan setiap masing-masing kelompok memiliki ketua kelompok yang bertugas membantu kerja pendamping.” (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)*

Berdasarkan keterangan di atas dapat dimengerti bahwa kesuksesan pelaksanaan PKH ini tidak akan terlepas dari adanya kerjasama antara Pendamping dan pihak pemerintah desa. Sehingga dalam mengatasi masalah tersebut Dinas Sosial telah menjalankan beberapa program penanganan masalah yakni melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan graduasi mandiri. Seperti yang disampaikan oleh Bu Indah seperti berikut:

*“ yaa kita juga tidak hanya diam, karena Pemerintah juga mengatur kebijakan adanya program resertifikasi dan graduasi mandiri. Resertifikasi itu seperti pendataan ulang. Jadi teman-teman pendamping itu kita sebar di seluruh kecamatan dengan system silang, misalnya pendamping karanganyar melakukan resertifikasi di kecamatan jogorogo, jadi intinya para pendamping tidak mensertifikasi di wilayah yang mereka dampingi sehingga unsur objektivitas bisa berjalan. Dalam resertifikasi terdapat pendataan terkait pendapatan berapa, keadaan rumahnya bagaimana, asetnya apa saja, dll. Dengan adanya data tersebut akan ditentukan siapa saja yang akan kita eliminasi dari kpm pkh. Sedangkan untuk graduasi mandiri, kita mengintruksikan kepada para pendamping agar dapat mengedukasi para kpm pkh bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sehingga yang dirasa sudah mampu agar memberikan kepada saudara lain yang lebih membutuhkan. Saat kebijakan ini kami jalankan ternyata banyak sekali yang tergraduasi baik secara mandiri maupun resertifikasi. Jadi bisa dikatakan cukup efektif untuk dijadikan metode penyelesaian kasalahan sasaran.” (Hasil wawancara dengan Dra. Indah Setyastuti, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 08.40 WIB)*

Berdasarkan penjelasan Bu Indah di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial melalui Pendamping melakukan sosialisasi atau mengedukasi para penerima PKH mengenai kesadaran diri bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang bisa memberi sesuatu kepada orang lain itu lebih utama dari pada seseorang yang mengharap pemberian orang lain seakan mengemis kepada orang lain.

Kemudian peneliti juga mendapat informasi lain dari informan lain, dalam upaya meminimalisir permasalahan PKH di kalangan KPM PKH Dinas Sosial Ngawi juga melakukan kegiatan monitoring, seperti yang dijelaskan oleh Mas Didit selaku salah satu pendamping di Kabupaten Ngawi Sebagai Berikut:

*“Dinas juga sering melakukan monitoring (pemantauan) ke lapangan itu dilakukan beberapa kali sampai sekarang meskipun belum dilakukan pada semua kelompok KPM PKH, mungkin baru tingkat kecamatan dan dalam satu kecamatan itu diambil sampling tiga atau empat desa yang dimonitoring. Namun, saat melakukan monitoring ini Dinas Sosial seringkali sebelumnya tidak memberi konfirmasi pada pendamping, jadi melakukan sidak langsung tanpa kode. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui kondisi langsung KPM di lapangan apakah program berjalan dengan baik ataukah ada masalah di bawah”.*

Melalui data tersebut kita dapat mengetahui bahwa Dinas Sosial telah mengupayakan banyak hal agar program Bantuan Sosial PKH dapat diminimalisir permasalahannya baik dari segi masalah teknis maupun penyalurannya, sehingga mampu membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dari belenggu kemiskinan khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi.

Monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawasan sejauh mana program PKH dilaksanakan. Sehingga monitoring ini merupakan bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan

program. Jadi sebenarnya monitoring ini dilakukan sebagai salah satu proses yang harus dilakukan untuk kelancaran program graduasi mandiri. Maka untuk mengetahui bagaimana mekanisme model graduasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ngawi ini peneliti juga mendapat keterangan yang lebih kompleks dari informan lain yakni Mas Wisnu, seperti berikut ini:

*“Setiap pendamping itu kan ada tugas mengedukasi kelompoknya mulai dari pendidikan anak, pola asuh anak, manajemen keuangan, juga termasuk kesadaran untuk bisa mandiri. Sebenarnya program bantuan PKH ini kan outputnya kalau mereka sudah bisa lulus sudah tidak menggantungkan diri dengan bantuan sosial. Edukasi biasanya kita laksanakan setiap bulan sekali per kelompok. Tapi kesulitannya ya namanya manusia ketika diberi bantuan itu pasti egonya kan berat, yang susah itu di penedarannya. Maka dari itu ada metode lain yakni selain pendamping mengedukasi juga mereka dapat melibatkan perangkat desa seperti dengan mbah lurah. Kita kan sudah punya planing dalam arti kita sudah punya sasaran siapa saja yang akan kita keluarkan dari anggota kpm pkh. Misalnya saya punya dampingan memiliki 250 orang kpm pkh , Saya kan sudah punya target oh si A si B itu kelihatannya sudah layak untuk digraduasi, nah kita fokus pada target tersebut dengan memberinya edukasi yang lebih mendalam. Ketika itu kita mendatangkan perangkat desa misalkan mbah lurah itu biasanya kan akan membuat mereka pekewuh dan akhirnya mereka dengan suka rela mau mengundurkan diri dari PKH. “ (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)*

Penjelasan Mas Wisnu tersebut telah menuturkan juga bahwa untuk membuat para KPM bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan sosial lagi di masa mendatang, selain edukasi tentang kesadaran diri untuk KPM yang sudah mampu agar mengundurkan diri Dinas Sosial juga memberikan bekal melalui pembinaan kepada para KPM PKH melalui pendamping. Kegiatan ini disebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam kegiatan ini KPM PKH dibina agar mendapat pemahaman mengenai bagaimana pentingnya mendidik dan mengasuh seorang anak, menjaga kesehatan dan gizi

anak, memenejemen keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH ini untuk dapat membuat Masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Ngawi ini agar mendapat kesejahteraan. Dinas Sosial telah bersinergi dengan banyak *stakeholder* agar PKH ini mampu membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten ngawi. Salah satunya adalah dengan meminimalisir ketidak tepat sasaran penerima bantuan PKH di Ngawi. Peneliti mendapatkan informasi dari Informan bahwa untuk membuat PKH ataupun setiap bantuan sosial yang diturunkan pemerintah itu tepat sasaran maka diperlukan kerjasama antara semua kalangan baik dari Dinsos melalui pendamping, Perangkat Desa, maupun KPM. Berikut ini penjelasan Mas Wisnu mengenai bagaimana dinas Sosial meminimalisir kelasahan sasaran dalam penyaluran bantuan:

*“Jadi gini mbak, dalam menjalankan pkh ini kan kita tidak bisa berjalan sendiri , karena data itu melibatkan banyak stackeholder. Terutama dari tingkat desa, jadi sangat diperlukan Kerjasama dengan pemerintah desa. Karena untuk aturan, bansos sendiri kan sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa sasarannya harus diambil dari DTKS, perkara DTKS nya ternyata ada beberapa yang kurang pas itu sendiri kan harus melibatkan pihak pemerintah desa agar lebih pro aktif untuk memperbaiki data tersebut. Kalau memang sudah terlanjur ditetapkan sebagai calon penerima dari kementrian kan kita bisa filter saat validasi dan verifikasi kita bisa membatalkan. Tapi andaikan ada yang lolos dari jaring saat proses filter kita lakukan misalkan Ketika PKH sudah dijalankan ada penerima yang sudah mampu dan tidak layak lagi menjadi kpm tapi menjadi penerima untuk mengatasinya untuk prosesnya yang pertama ada graduasi mandiri jadi itu kerelaan dari kpm untuk mengundurkan diri dari pkh, yang kedua bisa pakai surat keterangan mampu dari desa. Karena untuk saat ini untuk memutus bantuan dari kpm yang sudah mampu itu eksekusinya langsung oleh pendamping itu sampai saat ini belum ada parameternya. Misalkanya saya seorang pendamping kemudian saya menemukan satu anggota kpm saya ternyata ada yang dari keluarga kaya itu saya tidak bisa serta merta mengeluarkan dia dari daftar KPM, yaitu bisa dilakukan jika ada legalitas dari desa. Jadi pendamping konsultasi*

*dengan perangkat desa “pak itu kok sudah mampu kok bisa masuk menjadi penerima bansos?” misalkan perangkat desa tersebut juga sepakat dengan pendapat pendamping kemudian beliaunya juga berani mengeluarkan surat keterangan untuk KPM tadi maka itu bisa kita eksekusi dikeluarkan dari PKH. Kalau kita tidak memiliki pegangan legalitasnya maka kita juga tidak berani.”* (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)

Keterangan yang disampaikan informan di atas dapat dimengerti bahwa salah satu bentuk strategi yang dilakukan Dinas Sosial ketika ada PKM lolos dari jaringan saat melakukan verifikasi dan validasi adalah dengan menjalankan program graduasi mandiri dan bekerjasama dengan perangkat desa untuk memberikan legalitas mengeluarkan KPM PKH dari DTKS.

Selain itu informan juga menambahkan bahwa masalah DTKS ini sangat berpengaruh saat mengatasi KPM PKH yang akan dikeluarkan. Karena saat menggraduasi KPM PKH yang ternyata sudah mampu ataupun sudah kaya, maka KPM tersebut harus dikeluarkan dulu dari DTKS. Karena jika dilihat dari aturan pemerintah setiap orang yang masuk dalam DTKS itu pasti dianggap layak menerima bantuan sosial. Untuk proses pengeluarannya yang dapat mengeluarkannya dari data tersebut hanya Pemerintah Desa. Oleh karena itu Perangkat Desa harus menginput perbaikan DTKS. Tidak selesai samapai disitu pengolahan data tersebut akan dilanjutkan di tingkat kabupaten dan setelah itu baru dapat dieksekusi oleh Dinas Sosial.

#### **D. ANALISIS DATA**

Berdasarkan data-data yang telah dijabarkan di atas masih dianalisis lagi menggunakan teori yang dikemukakan oleh Anwar Arifin bahwa Strategi

komunikasi terdiri dari beberapa elemen dalam merumuskannya diantaranya adalah pengenalan khalayak, penyusunan pesan, menentukan metode, penggunaan media dan perang komunikator. Sedangkan untuk perumusannya Anwar Arifin mempertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap rumusan Harold Laswell yakni *“Who Says What Which What Channel To Whom With What Effect?”*

### **Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui PKH**

#### **1. Pengenalan Khalayak**

Mengenali khalayak merupakan bagian langkah pertama yang harus dilakukan oleh komunikator dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa komunikan atau khalayak itu sebenarnya tidak hanya bersikap pasif namun juga harus aktif agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif karena antara komunikator dengan komunikan bukan hanya terjadi sebuah hubungan namun juga dapat saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa dalam implementasi PKH yang menjadi komunikator adalah Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Tim koordinator Kabupaten Pelaksana PKH dan juga pendamping yang semua merupakan di bawah kendali Dinas Sosial Ngawi. Sedangkan komunikannya adalah Penerima Bantuan Sosial PKH.

Dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin melalui PKH ini Dinas Sosial menggunakan program P2K2 (Pertemuan Peningkatan Keluarga) sebagai bentuk pembinaan kepada para KPM PKH agar kelak bisa menjalani kehidupan

yang lebih baik dan juga ada program Graduasi sebagai sarana untuk meminimalisir masalah penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran.

Strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Ngawi dalam mengenali khalayaknya adalah dengan cara melihat berdasarkan kerangka referensi KPM PKH yang mana pada dasarnya yang menjadi khalayak adalah para ibu rumah tangga yang notabennya Kabupaten Ngawi sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang mayoritas masyarakatnya merupakan petani atau buruh tani yang memiliki latar pendidikan yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Mas Didit sebagai salah satu pendamping:

*“jadi PKH ini bantuannya disalurkan melalui ibu-ibu mbak, jadi ya saat pertemuan gitu semua anggotanya ibu-ibu. Setiap masing-masing KPM kan memiliki tingkat pengalaman maupun pendidikan yang berbeda sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Dan setiap daerah yang saya dampingi itu kan tipekal masyarakatnya dalam memahami sesuatu itupun juga berbeda. Maka dari itu agar saya bisa menyampaikan informasi dan bisa diterima dipahami oleh kelompok KPM PKH yang sedang saya dampingi, saya meminta bantuan salah satu anggota PKH yang telah ditunjuk sebagai ketua kelompok mereka untuk mengetahui bagaimana karakteristik para KPM yang sedang saya dampingi sehingga pesan yang saya berikan bisa dengan mudah mereka pahami. Begitu pula saat mengedukasi KPM untuk kesadaran diri mengundurkan diri dari PKH jika sudah mampu.”* (Hasil wawancara dengan Mas Azhari Yoga Ditya, S.Pd pada hari Rabu, 02 September 2020 pukul 09.39 – 22.38 WIB)

Jadi pengenalan khalayak dilakukan dengan melihat masing-masing wilayah dampingan, karena antara desa satu dengan yang lain, bahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dalam penyampaian pesan pun nanti juga akan menggunakan metode yang berbeda. Selain itu ketika seorang komunikator ingin menyampaikan pesan juga harus memperhatikan situasi kondisi dari khalayak. Dalam hal ini Dinas sosial dalam menentukan sebuah kebijakan atau akan membuat informasi baru



untuk para KPM, mereka melihat kondisi umum yang sedang terjadi di masyarakat. Sehingga Dinas Sosial dapat membuat kebijakan yang sekiranya tidak memberatkan untuk para KPM PKH. Demikian pula dengan pendamping selaku tangan panjang dari Dinas Sosial Ngawi yang melaksanakan program di lapangan, dalam melaksanakan kegiatan misalkan pendampingan ataupun P2K2 juga mempertimbangkan situasi kondisi dari khalayaknya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Didit:

*“sebelum mengadakan pertemuan biasanya kami melihat kondisi dari KPM apakah sedang masa-masa repot. Karena rata-rata disini kan petani jadi kalau pas musim tanam atau panen gitu kan pasti banyak yang repot, jadi kita ngambil waktu yang sekiranya paling longgar. Selain kondisi kita juga mempertimbangkan situasi saat kegiatan berlangsung. Saat kami menyampaikan sebuah informasi ataupun materi saat melakukan pembinaan kepada para KPM biasanya kalau ibu-ibu kan suka ngrumpi ya mbak, jadi kadang sering kali pertemuan jadi rame. Nah pada saat yang tidak kondusif seperti itu kami diam sejenak di tengah-tengah kegiatan sampai ibu-ibu anteng kembali. Karena biasanya mereka akan merasa pekewuh sendiri. Kemudian setelah semua bisa kondusif baru kegiatan dilanjutkan. Sehingga apa yang kami sampaikan bisa didengar dan dipahami. Sedangkan untuk edukasi agar KPM yang sekiranya sudah mampu mau melakukan graduasi mandiri biasanya kami juga melihat-lihat apakah saat itu kondisi psikis KPM dalam keadaan stabil atau tidak agar saat kita menyampaikan pemahaman bisa diterima tanpa menyinggung.”* (Hasil wawancara dengan Mas Azhari Yoga Ditya, S.Pd pada hari Rabu, 02 September 2020 pukul 09.39 – 22.38 WIB)

Klasifikasi khalayak Dinas Sosial Ngawi dalam penyaluran PKH ini adalah para Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antar masing-masing KPM. Namun dalam mengawasi jalannya PKH ini agar bisa terealisasi dengan baik biasanya Dinas Sosial melalui pendamping harus mempunyai target yang sekiranya KPM tersebut sudah tidak layak menerima Bansos. Sehingga KPM yang sekiranya dipandang sudah tidak

layak menerima Bansos maka pendamping akan lebih fokus pada mereka dan lebih mendalam lagi dalam memberi pemahaman kepada mereka agar mau mengundurkan diri.

Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum menyampaikan pesan, pendamping harus mengetahui situasi dan kondisi dari KPM PKH apakah mereka dalam keadaan stabil dan nyaman untuk menerima pesan dari komunikator.

## 2. Penyusunan Pesan

Langkah selanjutnya dalam strategi komunikasi adalah penyusunan pesan. Dinas Sosial Ngawi harus menetapkan apa saja yang akan disampaikan kepada khalayak dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin khususnya di Ngawi. Sesuai dengan formula Laswell mengenai rumus *Says what?* dalam hal ini Dinas Sosial Ngawi telah menyusun pesan beberapa diantaranya tentang informasi kebijakan PKH, informasi pencairan PKH, memberi materi kepada KPM berupa pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, pendidikan, manajemen keuangan/ekonomi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan disabilitas yang mana semua materi tersebut telah dijadikan sebuah modul untuk kegiatan P2K2. Selain itu Dinas Sosial Ngawi juga memberikan edukasi kepada para KPM PKH yang sudah mampu tentang kesadaran moral. Hal ini telah disampaikan oleh Mas Wisnu sebagai berikut:

*“untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat miskin melalui PKH ini kita kan ada kegiatan P2K2, nah kita telah membuat modul yang isinya tentang berbagai pengetahuan mulai dari kesehatan dan gizi, pola asuh anak, manajemen keuangan, hingga kesejahteraan sosial. Modul ini kita berikan kepada*

*masing-masing pendamping. Jadi yang akan melakukan pembinaan adalah pendamping saat pertemuan dengan KPM. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebulan sekali. Selain itu biasanya juga ada pemberian materi khusus, misalkan saat kita menemukan ada penerima PKH yang merupakan anggota lama dan karena sudah lama mendapatkan bantuan kemudian perekonomiannya jauh lebih mapan maka biasanya kami memberi edukasi yang intinya agar KPM Tersebut mau mengundurkan diri dari PKH.” (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)*

Dalam strategi penyusunan pesan ini hal utama yang harus Dinas Sosial Ngawi lakukan adalah bagaimana menarik perhatian. Hal ini sesuai dengan *A-A procedure (From Attention To Action Procedure)*. Maksudnya adalah menggerakkan seseorang atau banyak orang untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan membangkitkan perhatian diharapkan mampu menimbulkan minat dan kepentingan sehingga dapat memiliki hasrat untuk menerima keputusan sehingga akan menimbulkan perubahan berupa tindakan. *A-A Procedure* yang dilakukan Dinas Sosial Ngawi ini biasanya yang menarik perhatian KPM PKH adalah saat mendengarkan informasi masalah pencairan maupun informasi kebijakan baru dan juga saat sosialisasi untuk melakukan graduasi bagi yang telah mampu secara finansial. seperti dalam penjelasan Mas Didit berikut ini:

*“Biasanya para KPM PKH akan cenderung memperhatiakn ketika saya menginformasikan soal masalah pencairan maupun aturan baru mbak dan juga pada saat saya mengedukasi anggota mengenai sosialisasi untuk melakukan graduasi mandiri. Hal ini terjadi mungkin karena mereka merasa itu hal yang penting bagi mereka karena itu terkait informasi prosedur suatu kebijakan. Namun pada saat kegiatan P2K2 anggota tidak selalu kondusif, kadang saat saya menjelaskan materi mereka juga ada yang mengobrol sendiri, jadi saat seperti itu saya menarik perhatian mereka dengan cara memberikan pemahaman bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hal penting. Sehingga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh mereka dan kemudian mereka dapat menjalankan apa yang*

*telah diinformasikan.”* (Hasil wawancara dengan Mas Azhari Yoga Ditya, S.Pd pada hari Rabu, 02 September 2020 pukul 09.39 – 22.38 WIB)

Terkait dalam penyusunan pesan dalam suatu komunikasi juga sangat penting karena ada maksud dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan formula Laswell yakni berdasarkan tujuan sentral strategi komunikasi adalah *to secure understanding*, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Untuk itu perlu strategi dalam penyusunan pesan seperti yang disampaikan oleh Mas Wisnu:

*“Dalam membuat modul materi untuk Peningkatan Kemampuan Keluarga kami Dinas Sosial membuat modul tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan simpel untuk dipelajari oleh semua kalangan. Sehingga baik itu KPM yang berpengetahuan luas maupun kurang ketika menerima materinya juga gampang. Sedangkan untuk Pendamping biasanya mereka menyampaikan informasi maupun materi lebih banyak menggunakan bahasa jawa campuran disertai dengan gambar atau poster, karena notabennya anggota KPM PKH rata-rata memiliki pendidikan yang kurang dan lebih sering memakai bahasa jawa, hal ini disebabkan karena orang desa kan biasa mbak keseharian mereka komunikasinya dengan Bahasa Jawa.”* (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan pesan yang dibuat dengan simpel dan penggunaan bahasa keseharian saat menyampaikan informasi maupun materi akan lebih mudah dipahami oleh khalayak. Sehingga dengan mereka paham maka khalayak dapat mengamalkannya dalam bentuk tindakan yang mereka lakukan.

Melalui fakta-fakta tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Ngawi dalam strategi penyusunan pesan sudah sangat baik, sangat memperhatikan unsur-unsur penting dalam penyampaian pesan, mulai dari membangkitkan perhatian, menyiapkan isi pesan, dan menerapkan pesan tersebut.

Memperhatikan penggunaan bahasa dan media pendukung seperti gambar atau poster yang mudah dimengerti yang bertujuan untuk tercapainya pemahaman antara komunikator dengan komunikan.

### 3. Menetapkan Metode

Setelah mengenali khalayak dan menyusun pesan sedemikian rupa, maka tahap selanjutnya dalam strategi komunikasi adalah dengan menentukan metode penyampaian pesan yang sesuai dengan isi pesan yang akan disampaikan dan juga memperhatikan situasi dan kondisi dari komunikannya. Dalam hal ini Dinas Sosial menyampaikan pesan jika itu mengenai informasi kebijakan maka cara menyampaikan pesannya dengan metode *informatif* yakni dengan menginformasikan kebijakan kepada para anggota KPM dan juga dengan *redudency* yakni dengan mengulang-ulang berita atau kabar yang disampaikan kepada para KPM PKH. Mengapa menggunakan *redudency* juga? Hal ini dikarenakan untuk menghindari kemungkinan komunikan tidak mendengar informasi yang disampaikan ataupun kemungkinan komunikan kurang paham dengan informasi yang disampaikan Dinas Sosial baik oleh Kasi Jaminan Sosial dan Keluarga maupun Tim Koordinasi PKH Kabupaten juga para pendamping.

Selain itu Dinas Sosial melalui Pendamping juga menggunakan metode *edukatif* dalam menyampaikan pesan jika itu berkaitan dengan materi peningkatan kemampuan keluarga yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada para KPM PKH bagaimana cara pola asuh anak, kesehatan, cara manajemen keuangan, pengetahuan tentang kesejahteraan lansia dan disabilitas yang mana materi

tersebut juga telah menjadi modul pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga isi pesannya mengenai materi-materi yang telah dijadikan modul oleh Dinas Sosial Ngawi sebagai bentuk pembekalan kepada KPM PKH agar mereka memiliki pemahaman betapa pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi anak seperti yang disampaikan oleh Bu Indah sebelumnya.

Dinas Sosial Ngawi melalui pendamping dalam pelaksanaan program graduasi mandiri dalam menyampaikan pesan berupa materi penyadaran diri bagi kelompok penerima PKH yang sudah mampu juga menggunakan metode *edukatif* disertai dengan *persuasive*. seperti yang dikatakan Mas Wisnu pada halaman sebelumnya seperti berikut ini:

*“Setiap pendamping itu kan ada tugas mengedukasi kelompoknya mulai dari pendidikan anak, pola asuh anak, manajemen keuangan, juga termasuk penyadaran untuk bisa mandiri. Sebenarnya program bantuan PKH ini kan outputnya kalau mereka sudah bisa lulus sudah tidak menggantungkan diri dengan bantuan sosial. Edukasi biasanya kita laksanakan setiap bulan sekali per kelompok. Tapi kesulitannya ya namanya manusia ketika diberi bantuan itu pasti egonya kan berat, yang susah itu di penedarannya. Maka dari itu ada metode lain yakni selain pendamping mengedukasi juga mereka dapat melibatkan perangkat desa seperti dengan mbah lurah. Kita kan sudah punya planing dalam arti kita sudah punya sasaran siapa saja yang akan kita keluarkan dari anggota kpm pkh. Misalnya saya punya dampingan memiliki 250 orang kpm pkh , Saya kan sudah punya target oh si A si B itu kelihatannya sudah layak untuk digraduasi, nah kita fokus pada target tersebut dengan memberinya edukasi yang lebih mendalam. Ketika itu kita mendatangkan perangkat deda misalkan mbah lurah itu biasanya kan akan membuat mereka pekeuh dan akhirnya mereka dengan suka rela mau mengundurkan diri dari PKH.”* (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pendamping selain mengedukasi KPM mereka juga menerapkan metode Persuasive dengan adanya

pihak kelurahan sehingga dengan kehadiran salah satu Perangkat Desa akan membuat KPM PKH merasa terbujuk secara halus.

Metode yang digunakan Dinas Sosial Ngawi ketika menyampaikan pesan dalam setiap programnya baik itu saat Pendampingan, P2K2 maupun Graduasi, pada prinsipnya sudah tepat.

#### 4. Pemilihan Media Komunikasi

Media komunikasi merupakan sarana yang dapat mempermudah seorang komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan. Oleh karena itu pemilihan media komunikasi yang tepat sangatlah penting. Dalam hal ini Dinas Sosial menggunakan media komunikasi *Whatsapp* sebagai alat penghubung dengan para komunikator dan juga Radio untuk berkomunikasi dengan komunitas dalam jangkauan yang lebih luas. Seperti yang dikatakan oleh Mas Wisnu berikut ini:

*“Dalam menyampaikan informasi kita punya grup wa yang menaungi seluruh sdm (grup yang terdiri dari sekretariat pkh di dinas sosial), kemudian ada grup juga untuk korcab korcab (koordinator kecamatan) pendamping yang terhubung langsung dengan dinas. Namun kalau untuk yang seluruh sdm ini kami tidak membuatnya. Soalnya gini mbak, komunikasi yang anggotanya semakin sedikit itu kan lebih efektif. Jadi yang terhubung dengan dinas itu hanya korcab. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat kami pernah berkerjasama dengan Radio Suara Ngawi untuk menyampaikan informasi sekaligus tanya jawab mengenai permasalahan PKH yang terjadi kalangan masyarakat”* (Hasil wawancara dengan Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)

Sedangkan untuk berkomunikasi dengan KPM PKH biasanya Pendamping yang menjadi koordinasinya sebagai perwakilan dari Dinas Sosial Ngawi. Pendamping sendiri dalam menyampaikan pesan kepada khalayak menggunakan

media tatap muka langsung dan juga via *Whatsapp*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mas Didit berikut ini:

*“saat menyampaikan pesan baik berupa informasi atau apapun itu yang berkaitan dengan PKH biasanya kita menggunakan konsep tatap muka langsung. Jadi kita kan setiapbulan ada pertemuan, naah dalam kegiatan tersebut saya menyampaikan informasi maupun materi kepada KPM secara langsung. Disitu pula biasanya saya memberikan kesempatan kepada para PKH yang memiliki permasalahan terkait PKH untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan jika itu darurat biasanya saya berkomunikasi lewat WA. Namun biasanya saya bertukar informasi dengan ketua kelompok. Jadi para anggota ketika memiliki permasalahan darurat bisa menyampaikannya pada ketua kelompok kemudian ketua kelompok menyampaikn kepada saya. Begitu pula ketika saya memiliki informasi dadakan juga mennginformasikannya lewat ketua kelompok agar disampaikan kepada seluruh anggota.”* (Hasil wawancara dengan Mas Azhari Yoga Ditya, S.Pd pada hari Rabu, 02 September 2020 pukul 09.39 – 22.38 WIB)

Pemilihan media dengan tatap muka langsung dengan komunikan merupakan cara paling efektif agar komunikasi dapat memberikan pengaruh pada komunikan. Karena selain pertemuan tatap muka merupakan sebuah kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini juga karena khalayak yang dituju notabennya adalah ibu-ibu yang sudah tua ataupun sepuh sehingga banyak sekali yang kesulitan dalam menggunakan media elektronik seperti HP. Jadi, kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka akan meminimalisir adanya *miss* komunikasi.

## 5. Peran Komunikator dalam Komunikasi

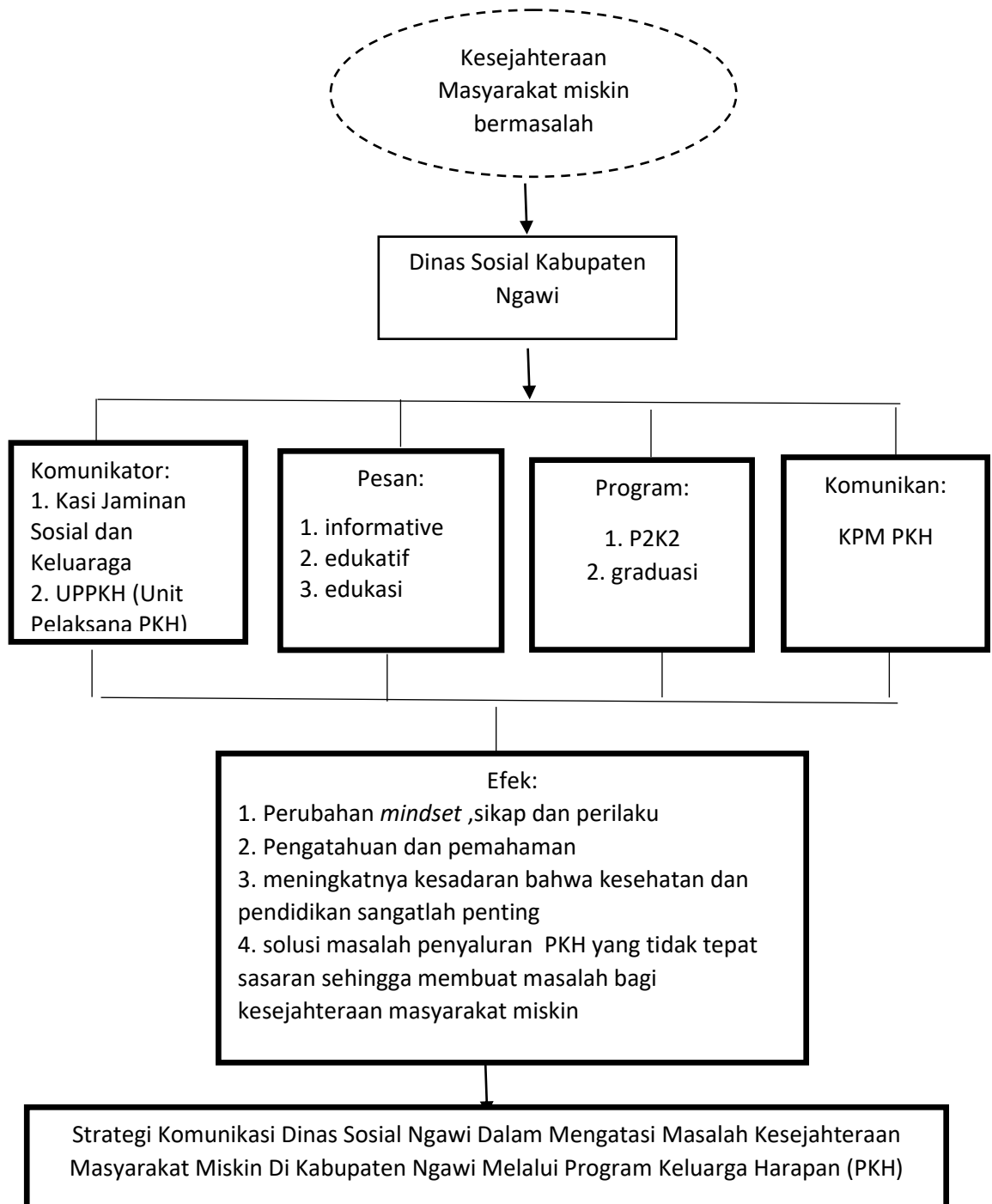
Komunikator merupakan komponen paling penting dalam komunikasi. Karena komunikator adalah orang yang berperan penting mengenai kemana arah komunikasi yang akan dibawa. Dalam sebuah strategi komunikasi seorang komunikator harus memiliki daya tarik dan kredibilitas untuk memberikan efek kepada khalayak dengan berbagai bentuk perubahan-perubahan baik perilaku



maupun pola pikir. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Ngawi baik dari Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Tim Koordinasi PKH Kabupaten, maupun Pendamping PKH biasanya saat mereka terjun ke lapangan mereka menggunakan sragam dinas sehingga hal itu akan memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa mereka sedang menjalankan tugasnya. Selain itu para pelaksana PKH tersebut juga selalu mengedepankan sikap empati kepada para penerima PKH sehingga tercipta sebuah keakraban. Tindakan ini dimaksudkan agar komunikator dapat dengan mudah untuk menjalankan program yang dijalankan agar terealisasi dengan baik.

Untuk lebih jelas bagaimana strategi komunikasi Dinas Sosial dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin melalui PKH dapat dilihat melalui bagan dibawah ini.

**Gambar 9. Model strategi penyaluran komunikasi**



(Sumber: penelitian 2018)

Berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Mas Wisnu selaku Operator pelaksanaan PKH di Kabupaten Ngawi mengenai apakah Dinas Sosial dalam menggunakan strategi komunikasi dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan untuk membantu Pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi ini seperti yang telah dijabarkan di atas telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Ia menjelaskan seperti di bawah ini;

*“Sebenarnya goalnya pkh ini adalah tentang perubahan mindset pentingnya pendidikan, kesehatan dan semakin kesini lebih ditingkatkan lagi pada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Harapannya ketika mereka sudah bisa berdiri di kaki mereka sendiri diharapkan bisa mengundurkan diri dari PKH. Tapi jika dilihat dari graduasi tadi belum menjadi goal dari PKH ini, karena goalnya itu mindset. Karena gini mbak, pkh ini kan di bawah bidang linjamsos jadi bukan bantuan ini bukan untuk mengganti atau menghidupi tapi hanya sebagai perlindungan sosial makanya nilainya pun juga tidak begitu fantastis sebenarnya. Sedangkan untuk memberdayakan para KPM itu kita bersinergi dengan Bidang Pemberdayaan Sosial yang hasilnya nanti dengan bersinergi bersama 2 bidang ini, agar para kpm pkh dapat hidup mandiri secara finansial. Upaya pemberdayaan ini dilakukan melalui program KUBE PKH jadi satu kelompok bantuannya sekitar 20 jt untuk modal usaha, untuk keanggotaan kube sendiri terdiri dari satu kelompok pkh dan 1 kelompok non pkh yang mana mereka juga masih termasuk anggota dalam dtks. Dulu sejak awal bantuan ini ada namun untuk tahun ini ditiadakan karenatahun 2020 ini indonesia juga terdampak oleh pandemi Covid 19 maka dananya dialokasikan untuk penanganan covid 19 ini.”* (Hasil wawancara dengan Mas Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)

Melalui keterangan di atas kita dapat mengetahui bahwa *goal* dari PKH ini sebearnya terletak pada perubahan pola pikir masyarakat mengenai kesehatan dan pendidikan. Karena dengan adanya kepedulian terhadap dua hal tersebut maka itu bisa mejadi bekal bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Selain itu sejak Dinas Sosial Ngawi bahkan juga bersinergi dengan bidang lain

untuk membuat peningkatan taraf hidup masyarakat miskin khususnya yang menerima PKH yakni dengan adanya program KUBE PKH (Kelompok Usaha Bersama) walaupun pada tahun 2020 ini tidak ada dikarenakan sebuah kondisi negara kita yang sedang terdampak wabah Covid 19.

Peneliti menyadari bahwa pada tahun 2020 ini hampir di seluruh negara telah mengalami dampak wabah covid 19 sehingga dimana-mana hal yang menjadi permasalahan utama adalah anjloknya perekonomian negara. Oleh karena itu peneliti menanyakan kepada informan mengenai efektivitas penggunaan strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial dengan program P2K2 dan Graduasi Mandiri untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi seperti apa. Selain keterangan di atas, Mas Wisnu juga menambahkan penjelasan seperti dibawah ini:

*“Dinas sosial dalam mengentaskan kemiskinan kan tidak bisa berjalan sendiri sehingga harus melibatkan banyak pihak. Kalau ukurannya dilihat graduasi saya rasa sudah mengurangi tapi dilain sisi tingkat kemiskinan di kabupaten ngawi ada kenaikan.jadi yang di klaster PKH kita berhasil mengurangi 2000 orang namun yang diluar pkh itu malah naik. Kenaikan tingkat kemiskinan untuk masa pandemi ini kan memang efeknya global, jadi tidak hanya di ngawi yang mengalami kenaikan bahkan di seluruh indonesia memang akibat dari pandemi covid 19 ini tingkat kemiskinan menjadii naik. Kalau yang kita dorong sdm pkh itu setiap bulan kita mengintruksikan pada setiap pendamping agar menyetorkan target-target yang akan di graduasi, minimal dalam satu tahun 1 pendamping ada 10 orang yang diusulkan. Jadi kalau di ngawi itu ada 140 pendamping, harusnya kalau masing-masing mengusulkan 10 orang untuk digraduasi maka setiap tahun kita dapat mengeluarkan 1400 KPM sedangkan masalah target itu terpenuhi atau tidak ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin.”* (Hasil wawancara dengan Mas Wisnu Prahara, S. E, Jum’at 28 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB)

Jadi dari pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya PKH yang dijalankan Dinas Sosial Ngawi telah mampu mengurangi

kemiskinan di Kabupaten Ngawi dalam lingkup klaster penerima PKH. Hal ini dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan oleh adanya program P2K2 telah mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih layak sehingga mereka bisa melakukan graduasi mandiri karena setelah sekian lama menjadi KPM PKH, mereka mampu menjalani kehidupan dengan berdiri di kaki mereka sendiri. Jika dilihat dari graduasi, Dinas Sosial Ngawi telah mencapai targetnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil graduasi pada tahun 2019 telah mencapai 2.511 KPM. Kemudian pada tahun 2020 KPM yang tergraduasi semakin meningkat yakni ada 6.827 KPM. Hasil pencapaian ini telah melampaui batas minimum yang ditargetkan oleh Dinas Sosial Ngawi yakni sekitar 1400 KPM pertahunnya. Jika dilihat dari konteks graduasi, maka Dinas sosial Ngawi sudah bisa dinyatakan sangat berhasil dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin dengan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

Dilansir dari *radarmadiun.jawapos.com* yang terbit pada 20 Februari 2020 mengenai keberhasilan program graduasi mandiri oleh Dinas Sosial Ngawi ini juga telah disinggung oleh Bapak Drs. Tri pujo Handono selaku Kepala Dinas Sosial Ngawi, pada waktu itu Indonesia belum terserang wabah covid 19. Jadi saat itu ia ditanya Jawa Pos mengenai apakah banyaknya peserta graduasi tersebut menjadi tanda sukses penurunan kemiskinan di Ngawi?, Bapak Tri Pujo memberikan keterangan bahwa PKH bisa dibilang ikut andil dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi dari 14,83% ke angka 14,39%. Seperti kata Kepala Dinas Sosial Ngawi yang dipaparkan di dalam laman *radarmadiun.jawapos.com* berikut ini:

*“Harusnya bisa dibilang begitu. Hanya saja ia tidak dapat memastikannya. Jika dilihat dari data BPS angka kemiskinan di Ngawi turun sedikit dari 14,83% menjadi 14,39%. Jika dihitung secara angka jumlahnya sekitar 35 ribu keluarga. Namun paling tidak PKH dapat menyumbang penurunan angka kemiskinan itu.”*

Hasil penelitian di atas telah memberikan sedikit pemahaman kepada kita bahwa Strategi Komunikasi yang dijalankan olehh Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi melalui Program Keluarga Harapan dengan menggunakan teori Anwar Arifin yang kemudian dikaitkan dengan formula komunikasi rumusan Harold Laswell bisa dikatakan cukup efektif dan bisa dibilang berjalan dengan sangat baik. Karena upaya yang dilakukan Dinas Sosial agar PKH dapat tersalurkan dengan tepat sasaran melalui banyaknya KPM yang sudah mampu itu banyak yang tergraduasi jadi bantuan bisa disalurkan kepada yang benar-benar berhak menerimanya itu sudah termasuk ikut andil dalam menyejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ngawi untuk menyejahterakan masyarakat miskin melalui PKH ini Dinas Sosial menggunakan program P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), Graduasi dan Dinas Sosial Ngawi juga melakukan bentuk evaluasi operasional berupa monitoring.

Strategi komunikasi Dinas Sosial Ngawi dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi dengan menerapkan P2K2 dan Graduasi mandiri dalam implementasi PKH adalah dengan melakukan beberapa tahapan yakni; **pertama**, Pengenalan Khalayak. Dalam implementasi PKH yang menjadi komunikator adalah Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Tim koordinator Kabupaten Pelaksana PKH dan juga pendamping yang semua merupakan di bawah kendali Dinas Sosial Ngawi. Sedangkan komunikannya adalah Penerima Bantuan Sosial PKH. Komunikator mengenali khalayak berdasarkan pada *kerangka referensi* dan situasi berserta kondisi KPM PKH yang dilakukan dengan melihat karakteristik masing-masing wilayah dampingan, dalam hal ini Dinsos Ngawi melalui pendamping dibantu oleh salah satu KPM PKH yang menjadi ketua kelompok.

**Kedua,** Dinsos Ngawi melakukan penyusunan pesan. Sesuai dengan formula Laswell mengenai rumus *Says what?* dalam hal ini Dinas Sosial Ngawi telah menyusun pesan beberapa diantaranya tentang informasi kebijakan PKH, informasi pencairan PKH, memberi materi kepada KPM berupa sebuah modul dalam kegiatan P2K2 dan edukasi kepada para KPM PKH yang sudah mampu tentang kesadaran moral. **Ketiga,** metode penyampaian pesan. Dalam hal ini Dinas Sosial menyampaikan pesan jika itu mengenai informasi kebijakan maka cara menyampaikan pesannya dengan metode *informatif* dan juga dengan *redudency*. Metode *edukatif* digunakan dalam menyampaikan materi dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Sedangkan dalam pelaksanaan program graduasi mandiri maka untuk menyampaikan pesan berupa materi penyadaran diri bagi kelompok penerima PKH yang sudah mampu menggunakan metode *edukatif* disertai dengan *persuasive*.

**Keempat,** pemilihan media komunikasi. Dalam hal ini Dinas Sosial menggunakan media komunikasi *Whatsapp* sebagai alat penghubung dengan para komunikan dan juga Dinas Sosial Ngawi bekerjasama dengan Radio Suara Ngawi sebagai media partnernya. **Kelima,** peranan komunikator dalam komunikasi. Dalam hal ini komunikator biasanya saat mereka terjun ke lapangan mereka menggunakan sragam dinas untuk menunjukkan kredibilitas mereka.. Selain itu para pelaksana PKH tersebut juga selalu mengedepankan sikap empati kepada para penerima PKH sehingga tercipta sebuah keakraban.

Melalui strategi komunikasi yang dilakukan Dinas sosial Ngawi, jika dilihat dari hasil graduasi mandiri sebagai bentuk pengurangan tingkat



kemiskinan di Kabupaten Ngawi, maka Dinas sosial Ngawi sudah bisa dinyatakan sangat berhasil dalam upaya menyejahterakan masyarakat miskin dengan mengupayakan penyaluran PKH menjadi tepat sasaran dan ikut andil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi yang semula 14,83% menjadi 14,39%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan”. Peneliti memberikan saran kepada:

1. Kepada Perangkat Desa agar membantu Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan melakukan updating terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap tahunnya. Karena segala bentuk bantuan sosial penerimanya menggunakan acuan data tersebut.
2. Kepada Dinas Sosial Ngawi untuk lebih meningkatkan program dan menambah program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kabupaten Ngawi khususnya berupa program pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Misalnya dalam program Bantuan Sosial PKH bisa dimasukkan kegiatan pelatihan ketrampilan untuk para KPM PKH, sehingga pelatihan ini bisa dimanfaatkan untuk membuat usaha mereka sendiri jadi tidak sekedar mengandalkan bantuan saja.
3. Kepada peneliti selanjutnya bahwa hasil penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan

Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan” ini, masih jauh dari kata sempurna dan perlu banyak perbaikan dari berbagai sudut pandanglainnya. Karena tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan sebagai akibat dari keterbatasan waktu, sumber rujukan, metode serta pengetahuan dan ketajaman analisis yang diiliki oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan sudut pandang komunikasi yang lain dan mampu menyajikan hasil penelitian dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Arifin, Anwar. 1984. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kementerian Sosial RI. Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 2019
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Suryadi, Edy. (2018). *Strategi Komunikasi (Sebuah Analisis Teori dan Praktis Di Era Global)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Moore, Frazier. (2004). *HUMAS (Membangun Citra Komunikasi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ardiwijaya, Arie., Gintin, Wiranta Yudha., & Martha, Layung Paramesti. (2020). *Ananlisis Strategi Komunikasi Dinas Sosial KotaBogor Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kota Bogor*. Jurnal Komunikasi Vol , No 1

- Pangesti, Lyza Audina. (2018). Strategi Komunikasi Devisi Public Relations PLN Distribusi Jawa Barat Dalam Sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran.. Jurnal Komunikasi Vol 12, No 01
- Purwanto, Slamet Agus., Sumartono & M. Makmur. (2013). *Implementasii Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojokerto)*. Jurnal Wacana Vol 16, No.2
- Elwan, La Ode Muhammad. (2018). *Implemetasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Publicuho: Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Indonesia
- Haris, Andi Muhammad Arif (2018). *Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Pekerja Sosial*. Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Edisi I
- Ngutra, Theresia. (2017). *Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar*. Makassar: Jurnal Universitas Negeri Makassar
- Tirani, Oktavia. (2017). *Implementasi Programn Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso*. Jurnal Kutalogis; Pascasarjana Tadulako Vol 5/6
- Najidah, Nurul., & Lestari, Hesti. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

- Wiranata, Tedi Setiadi. (2018). *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Menanggulangi Anark Jalanan Di Cilegon*. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Suradi. (2007). *Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12/03
- Bahril, Samsul Alil. (2017). *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*. Skripsi UIN Alauddin Makassar
- Puspaningsi, Cahyanti. (2016). *Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Skripsi UIN Alauddin Makassar
- Kusumawati, Eny. (2019). *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Semarang: Skripsi UIN Walisongo
- Mar'atus Sholihah. (2016). *Strategi Komunikasi Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi IAIN Jember
- Pujiati, Hikmah. (2018). *Strategi Pemasaran Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya

Hikmawati, Andi. (2015). *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Tamangapa Kecamatan Manggala*. Skripsi UIN Alauddin Makassar

Tadarusman, Yusuf. (2013). *Strategi Komunikasi PT. Republika Penerbit Dalam Mempromosikan Novel Islami*. skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Zega, Fitri Yanna. (2017). *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

<https://www.pojokkirimataraman.com/2020/02/1204-penerima-pkh-di-ngawi-mengundurkan.html> (diakses 20 Februari 2020 pukul 09.32 WIB)

[radarmadiun.jawapos.com](http://radarmadiun.jawapos.com) (diakses 29 September 2020 pukul 15.57 WIB)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses 10 Oktober 2019)

[ngawikab.bps.go.id](http://ngawikab.bps.go.id) (diakses 10 Oktober 2019)

[ngawikab.go.id](http://ngawikab.go.id) (diakses 10 Oktober 2019)

**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**Narasumber: Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial  
Kabupaten Ngawi**

1. Apa saja yang menjadi syarat penerima PKH?
2. Bagaimana peran PKH dalam mengatasi masalah kemiskinan?
3. Permasalahan apa saja yang muncul selama PKH dijalankan di Ngawi hingga saat ini?
4. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah strategi tersebut cukup efektif?
5. apakah PKH telah mampu membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Ngawi?

**Narasumber: Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Ngawi**

6. Dalam menargetkan siapa yang akan mendapat bantuan PKH apakah BDT mempengaruhi?
7. Bagaimana model pengawasan pelaksanaan PKH?
8. . apakah Dinas Sosial mengalami beberapa masalah dalam implementasi PKH?
9. Bagaimana cara mengatasi masalah pengaduan adanya penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran?
10. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ngawi dalam menjalankan program bantuan sosial PKH? Bagaimana penanganan masalah tidak tepat sasaran mengenai penyaluran PKH ini?

11. Media apa yang digunakan Dinsos Ngawi untuk kelancaran komunikasi pelaksanaan PKH?
12. Apakah strategi komunikasi melalui PKH ini sudah berhasil mencapai tujuan?
13. Apakah strategi komunikasi yang dilakukan melalui PKH telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi?

**Narasumber: Pendamping PKH**

14. Apa yang dilakukan Dinas Sosial untuk mensukseskan jalannya PKH?
15. Bagaimana strategi anda agar saat mengadakan pertemuan proses komunikasi anda dengan anggota KPM PKH bisa berjalan dengan efektif?
16. Bagaimana cara anda menarik perhatian anggota KPM PKH agar kegiatan pendampingan maupun P2K2 bisa berjalan kondusif?
17. Media apa yang anda gunakan untuk kemudahan berkomunikasi dalam implementasi PKH?



## **LAMPIRAN 2**

### **Hasil Wawancara 1**

#### **Key Informan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi**

**Nama : Dra. Indah Setyastuti**

**Jabatan: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**Hari : Jum'at, 28 Agustus 2020**

**Jam : Pukul 08.40 WIB**

#### **1. Apa saja yang menjadi syarat penerima PKH?**

Penerima manfaat atau sasarannya adalah keluarga miskin yang desil terbawah namun dinsos tidak mendata. Kita menerima data penerima dari kementerian sosial dan kementerian sosial mendapat data keluarga miskin dari BPS pusat, jadi intinya bahwa pendataan miskin itu bukan dinsos namun dinsos hanya sebagai pelaksana program. Pkh ini kan bantuan sosial, anda tahu bahwa bansos itu bermacam-macam, nah pkh ini salah satu bansos bersyarat. Karena KPM harus memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak sekolah atau lansia atau disabilitas, yang baru itu lansia dan disabilitas yakni diberlakukan pada tahun 2016 kalau nggak 2017. Mengapa saya katakan bersyarat karena tujuan dari pkh itu generasi yang akan datang itu bisa berubah menjadi lebih baik, jadi mereka diwajibkan datang ke layanan Kesehatan dan pendidikan. Karena Kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar. orang miskin karena dia tidak berpendidikan, atau dia tidak berpendidikan karena termasuk orang miskin.

#### **2. Bagaimana peran PKH dalam mengatasi masalah kemiskinan?**

Pemerintah melalui program pkh ini harapannya generasi yang akan datang itu lebih baik. Makanya di PKH itu ada motto bahwa saya miskin tapi anak saya tidak boleh miskin harapannya bahwa kpm itu ada perubahan pola pikir bahwa pendidikan itu penting Kesehatan juga penting sehingga tujuan pemerintah bantuan pkh itu dapat memutus rantai kemiskinan. Atau kemiskinan turun temurun.

#### **3. Permasalahan apa saja yang muncul selama PKH dijalankan di Ngawi hingga saat ini?**

Biasanya datang dari masyarakat yang notabennya tidak menerima dia ingin menjadi penerima pkh, hal ini biasanya karena ia melihat ada kpm yg menerima pkh padahal jika dilihat mereka sebenarnya sudah mampu. Semacam ini menjadi

sorotan sorotan bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena mungkin dulu memang kpm tersebut benar-benar tidak mampu, tapi saat program turun mereka sudah memiliki kehidupan yang layak dan lebih baik. Atau ada pula kpm yang menjadi sorotan masyarakat non kpm karena kpm tersebut terlihat sudah mampu namun pada kenyataannya sebenarnya ia mendapat warisan, atau ikut anak mantunya, dsb.

**4. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah strategi tersebut cukup efektif?**

Pemerintah juga mengatur kebijakan adanya program resertifikasi dan graduasi mandiri. Resertifikasi itu seperti pendataan ulang. Jadi teman-teman pendamping itu disebar di seluruh kecamatan dengan system silang, misalnya pendamping karanganyar melakukan resertifikasi di kecamatan jogorogo, jadi intinya para pendamping tidak mensertifikasi di wilayah yang mereka dampingi sehingga unsur objektivitas bisa berjalan. Dalam resertifikasi terdapat pendataan terkait pendapatan berapa, keadaan rumahnya bagaimana, asetnya apa saja, dll. Dengan adanya data tersebut akan ditentukan siapa saja yang akan kita eliminasi dari kpm pkh. Sedangkan untuk graduasi mandiri, kita mengintruksikan kepada para pendamping agar dapat mengedukasi para kpm pkh bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sehingga yang dirasa sudah mampu agar memberikan kepada saudara lain yang lebih membutuhkan. Saat kebijakan ini kami jalankan ternyata banyak sekali yang tergraduasi baik secara mandiri maupun resertifikasi. Jadi bisa dikatakan cukup efektif untuk dijadikan metode penyelesaian kasalahan sasaran.

**5. Apakah PKH telah mampu membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Ngawi?**

Kalau dilihat secara signifikan langsung itu tidak sih, namun kemiskinan itu kan disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga kalo ditanya pkh menurunkan kemiskinan? secara nasional memang membantu pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan.

## Hasil Wawancara 2

**Nama : Wisnu Prahara, S.E**

**Jabatan: Operator PKH dalam Tim Koordinator Kabupaten PKH**

**Hari : Jum'at, 28 Agustus 2020**

**Jam : Pukul 10.15 WIB**

### **6. Dalam menargetkan siapa yang akan mendapat bantuan PKH apakah BDT mempengaruhi?**

*“Setiap data bantuan sosial apapun itu mengambil dari DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) yang dulunya disebut BDT. Jadi awal penentuan kpm pkh itu juga diambil dari situ. DTKS sendiri harusnya ada updating terus bisa dilakukan setahun 2x. nah yang melakukan updating itu desa, jadi data itu bukan dari atasan. Yang jadi asumsi selama ini kan data itu turun dari atasan padahal yang dapat merubah data itu dari pihak desa. Kalau tidak melakukan updating data tidak akan berubah soalnya data yang fix masuk di BDT itu data tahun 2015, jadi kalau sampai sekarang tidak pernah melakukan updating maka misalkan ada bantuan saat penyaluran bansos maka outputnya pasti akan menjadi tidak tepat sasaran. Contohnya saja ada KPM yang datanya tidak pas karena sebelumnya tidak mampu namun karena terkena proyektor semacam menerima warisan kemudian menjadi langsung jadi kaya dadakan seperti itu maka untuk mengatasinya itu kan perlu proses dikeluarkan dulu dari DTKS. Karena kalau secara menurut aturan ya, Semua data yang ada dalam DTKS itu pasti dianggap itu layak menerima bantuan. Untuk mekanisme proses pengeluaran itu ya Kembali lagi lewat desa nanti ada musyawarah desa/ kelurahan yang hasilnya untuk mengeluarkan nama-nama ini dari DTKS. Setelah itu nanti di setiap desa itu ada satu operator desa tugasnya yaitu untuk menginput data perbaiki DTKS. Setelah di input operator desa itu nanti masih akan masuk di tingkat kabupaten nah baru setelah itu dapat dieksekusi di dinas sosial ini dan setelah dari sini nanti di upload lagi ke PUSJATIM ke kementerian, setelah disana nanti ada jangka waktu yang telah ditentukan itu nanti ada pengesahan data dari pusat, jadi jika nama ini sudah diusulkan dikeluarkan maka nanti pada pengesahan data berikutnya pasti dia sudah tidak masuk lagi dalam DTKS. Terus satu catatan, DTKS itu kan sudah ada kuotanya, jadi 40% dari penduduk wilayah misalkan ngawi memiliki penduduk 100 orang nah 40% nya harus masuk DTKS. dan jika ada misalkan ada orang yang lebih layak masuk dtks karena lebih miskin daripada salah satu orang yang masuk dalam dtks tapi dia belum masuk dalam dtks ya, itu tidak bisa langsung*

*dimasukkan, karena ini terkait dengan kuota 40% tadi ya, jadi Ketika ingin memasukkan yang baru maka pihak desa harus mengeluarkan orang yang dirasa cukup lebih mampu dari orang yang akan dimasukkan.”*

## **7. Bagaimana model pengawasan pelaksanaan PKH?**

*“Pkh itu kan ada pendamping ya, nah itu ya kepanjangan tangan dari dinas sosial, fungsi control sebenarnya ada pada mereka. Misalkan ini ada permasalahan ada calon penerima meskipun dia itu diambil dari data DTKS tadi, kita masih ada filter lagi berupa verifikasi dan validasi nanti kita datangi, biasanya sih kita koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Jadi misalkan di desa babadan ada 100 calon penerima nah datanya itu diberikan pada pemerintah desa, jadi filter awal ada di desa, perangkat desa akan mengfilter mana calon penerima yang sekiranya sudah mampu jadi sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Setelah dicoreti oleh pemerintah desa mana saja yang sudah mampu, kita pun juga tidak serta merta kita eksekusi, jadi kita masih mengadakan survei langsung. Biasanya yang kita jadikan parameter itu dua mbak, yakni dari perangkat desa dan ketua kelompok. Jadi setiap pendamping itu membawahi beberapa kelompok, dan setiap masing-masing kelompok memiliki ketua kelompok yang bertugas membantu kerja pendamping.”*

## **8. Apakah Dinas Sosial mengalami beberapa masalah dalam implementasi PKH?**

*“Kalau di ngawi saya rasa relatif lebih slow ya, karena tipikal masyarakat di ngawi juga cenderung kondusif, sejauh ini mungkin komplain-komplain yang masuk itu ya tentang “ saya kok gak dapet pkh”. ada 2 kemungkinan hal itu terjadi yaitu pertama, dia tidak masuk dalam DTKS dan kemungkinan kedua dia masuk dalam DTKS namun tidak masuk dalam Desil penerima pkh. Desil itu semacam tingkatan ekonomi. Jadi pada DTKS itu ada namanya desil yang terdiri dari beberapa klaster. sedangkan yang masuk menjadi penerima pkh itu yang dari golongan klaster atau desil 4 ke bawah. Jadi yang desilnya di atas 4 itu tidak bisa menjadidi penerima pkh. Yang mempengaruhi desil itu ya tergantung pada updating dari desa itu.”*

## **9. Bagaimana cara mengatasi masalah pengaduan adanya penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran?**

*“Jadi gini mbak, dalam menjalankan pkh ini kan kita tidak bisa berjalan sendiri , karena data itu melibatkan banyak stakeholder. Terutama dari tingkat desa, jadi sangat diperlukan Kerjasama dengan pemerintah desa. Karena untuk aturan, bansos sendiri kan sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa sasarannya harus*

*diambil dari DTKS, perkara dtksnya ternyata ada beberapa yang kurang pas itu sendiri kan harus melibatkan pihak pemerintah desa agar lebih pro aktif untuk memperbaiki data tersebut. Kalau memang sudah terlanjur ditetapkan sebagai calon penerima dari Kementerian kan kita bisa filter saat validasi dan verifikasi kita bisa membatalkan. Tapi andaikan ada yang lolos dari jaring saat proses filter kita lakukan misalkan Ketika pkh sudah dijalankan ada penerima yang sudah mampu dan tidak layak lagi menjadi kpm tapi menjadi penerima untuk mengatasinya untuk prosesnya yang pertama ada graduasi mandiri jadi itu kerelaan dari kpm untuk mengundurkan diri dari pkh, yang kedua bisa pakai surat keterangan mampu dari desa. Karena untuk saat ini untuk memutus bantuan dari kpm yang sudah mampu itu eksekusinya langsung oleh pendamping itu sampai saat ini belum ada parameterinya. Misalkanya saya seorang pendamping kemudian saya menemukan satu anggota kpm saya ternyata ada yang dari keluarga kaya itu saya tidak bisa serta merta mengeluarkan dia dari daftar kpm, yaitu bisa dilakukan jika ada legalitas dari desa. Jadi pendamping konsultasi dengan perangkat desa “pak itu kok sudah mampu kok bisa masuk menjadi penerima bansos?” misalkan perangkat desa tersebut juga sepakat dengan pendapat pendamping kemudian beliaunya juga berani mengeluarkan surat keterangan untuk KPM tadi maka itu bisa kita eksekusi dikeluarkan dari pkh. Kalau kita tidak memiliki pegangan legalitasnya maka kita juga tidak berani. “*

**10. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ngawi dalam menjalankan program bantuan sosial PKH? Bagaimana penanganan masalah tidak tepat sasaran mengenai penyaluran PKH ini?**

*“untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat miskin melalui PKH ini kita kan ada kegiatan P2K2, nah kita telah membuat modul yang isinya tentang berbagai pengetahuan mulai dari kesehatan dan gizi, pola asuh anak, manajemen keuangan, hingga kesejahteraan sosial. Modul ini kita berikan kepada masing-masing pendamping. Jadi yang akan melakukan pembinaan adalah pendamping saat pertemuan dengan KPM. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebulan sekali. Selain itu biasanya juga ada pemberian materi khusus, misalkan saat kita menemukan ada penerima PKH yang merupakan anggota lama dan karena sudah lama mendapatkan bantuan kemudian perekonomiannya jauh lebih mapan maka biasanya kita memberi edukasi yang intinya agar KPM Tersebut mau mengundurkan diri dari PKH. “Dalam membuat modul materi untuk Peningkatan Kemampuan Keluarga kami Dinas Sosial membuat modul tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan simpel untuk dipelajari oleh semua kalangan. Sehingga baik itu KPM yang berpengetahuan luas maupun kurang ketika menerima materinya juga gampang. Sedangkan untuk Pendamping biasanya mereka menyampaikan informasi maupun materi lebih banyak menggunakan bahasa jawa campuran disertai dengan gambar atau poster, karena notabennya anggota KPM PKH rata-rata memiliki pendidikan yang kurang dan lebih sering*

*memakai bahasa jawa, hal ini disebabkan karena orang desa kan biasa mbak keseharian mereka komunikasinya dengan Bahasa Jawa. Selain itu setiap pendamping itu kan ada tugas mengedukasi kelompoknya mulai dari pendidikan anak, pola asuh anak, manajemen keuangan, juga termasuk penyadaran untuk bisa mandiri. Sebenarnya program bantuan PKH ini kan outputnya kalau mereka sudah bisa lulus sudah tidak menggantungkan diri dengan bantuan sosial. Edukasi biasanya kita laksanakan setiap bulan sekali per kelompok. Tapi kesulitannya ya namanya manusia ketika diberi bantuan itu pasti egonya kan berat, yang susah itu di penadarannya. Maka dari itu ada metode lain yakni selain pendamping mengedukasi juga mereka dapat melibatkan perangkat desa seperti dengan mbah lurah. Kita kan sudah punya planing dalam arti kita sudah punya sasaran siapa saja yang akan kita keluarkan dari anggota KPM PKH. Misalnya saya punya dampingan memiliki 250 orang kpm pkh , Saya kan sudah punya target oh si A si B itu kelihatannya sudah layak untuk digraduasi, nah kita fokus pada target tersebut dengan memberinya edukasi yang lebih mendalam. Ketika itu kita mendatangkan perangkat desa misalkan mbah lurah itu biasanya kan akan membuat mereka pekewuh dan akhirnya mereka dengan suka rela mau mengundurkan diri dari PKH..*

**11. Media apa yang digunakan Dinsos Ngawi untuk kelancaran komunikasi pelaksanaan PKH?**

*“Kita punya grub wa yang menaungi seluruh sdm (grub yang terdiri dari sekertariat pkh di dinas sosial) , kemudian ada grub juga untuk korcab korcab pendamping yang terhubung langsung dengan dinas. Namun kalau untuk yang seluruh sdm ini kami tidak membuatnya. Soalnya gini mbak, komunikasi yang anggotanya semakin sedikit itu kan lebih efektif. Jadi yang terhubung dengan dinas itu hanya korcab. “*

**12. Apakah strategi komunikasi melalui PKH ini sudah berhasil mencapai tujuan?**

*“Sebenarnya goalnya pkh ini adalah tentang perubahan mindset pentingnya pendidikan, kesehatan dan semakin kesini lebih ditingkatkan lagi pada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Harapannya ketika mereka sudah bisa berdiri di kaki mereka sendiri diharapkan bisa mengundurkan diri dari pkh. Tapi jika dilihat dari graduasi tadi belum menjadi goal dari pkh ini, karena goalnya itu mindset. Karena gini mbak, pkh ini kan di bawah bidang linjamsos jadi bukan bantuan ini bukan untuk mengganti atau menghidupi tapi hanya sebagai perlindungan sosial makanya nilainya pun juga tidak begitu fantastis sebenarnya. Sedangkan untuk memberdayakan para kpm itu kita bersinergi dengan bidang pemberdayaan sosial yang hasilnya nanti dengan bersinergi bersama 2 bidang ini, agar para kpm pkh dapat hidup mandiri secara*

*finansial. Upaya pemberdayaan ini dilakukan melalui program KUBE PKH jadi satu kelompok bantuannya sekitar 20 jt untuk modal usaha, untuk keanggotaan kube sendiri terdiri dari satu kelompok pkh dan 1 kelompok non pkh yang mana mereka juga masih termasuk anggota dalam dtks. Dulu sejak awal bantuan ini ada namun untuk tahun ini ditiadakan karenatahun 2020 ini indonesia juga tterdampak oleh pandemi Covid 19 maka dananya dialokasi untuk penanganan covid 19 ini.”*

**13. Apakah strategi komunikasi yang dilakukan melalui PKH telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi?**

*“Dinas sosial dalam mengentaskan kemiskinan kan tidak bisa berjalan sendiri sehingga harus melibatkan banyak pihak. Kalau ukurannya dilihat graduasi saya rasa sudah mengurangi tapi dilain sisi tingkat kemiskinan di kabupaten ngawi ada kenaikan. jadi yang di klaster pkh kita berhasil mengurangi 2000 orang namun yang diluar pkh itu malah naik. Kenaikan tingkat kemiskinan untuk masa pandemi ini kan memang efeknya global, jadi tidak hanya di ngawi yang mengalami kenaikan bahkan di seluruh indonesia memang akibat dari pandemi covid 19 ini tingkat kemiskinan menjadii naik. Kalau yang kita dorong sdm pkh itu setiap bulan kita mengintruksikan pada setiap pendamping agar menyetorkan target-target yang akan di graduasi, minimal dalam satu tahun 1 pendamping ada 10 orang yang diusulkan. Jadi kalau di ngawi itu ada 140 pendamping, harusnya kalau masing-masing mengusulkan 10 orang untuk digraduasi maka setiap tahun kita dapat mengeluarkan 1400 kpm sedangkan masalah target itu terpenuhi atau tidak ya kita ttetap berusaha semaksimal mungkin..”*

### Hasil Wawancara 3

**Nama :Azhari Yoga Ditya, S.Pd**

**Jabatan: Pendamping PKH**

**Hari : Rabu, 02 September 2020**

**Jam : Pukul 09.39-22.38 WIB**

#### **14. Apa yang dilakukan Dinas Sosial untuk mensukseskan jalannya PKH?**

*“Dalam meningkatkan kinerja para pendamping Dinas Sosial sering kali melakukan Bimtab dan Bimtek, itu biasanya diadakan pada waktu contohnya jika ada kebijakan baru atau perubahan dari beberapa kebijakan yang sudah ada yang berkaitan dengan PKH, dimana perubahan kebijakan itu dapat selaras juga terealisasi dengan baik . selain itu dinas juga sering melakukan monitoring ke lapangan itu dilakukan beberapa kali sampai sekarang meskipun belum dilakukan pada semua kelompok KPM PKH, mungkin baru tingkat kecamatan dan dalam satu kecamatan itu diambil sampling tiga atau empat desa yang dimonitoring. Namun, saat melakukan monitoring ini Dinas Sosial seringkali sebelumnya tidak memberi konfirmasi pada pendamping, jadi melakukan sidak langsung tanpa kode. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui kondisi langsung KPM di lapangan apakah program berjalan dengan baik ataukah ada masalah di bawah.*

#### **15. Bagaimana sttrategi anda agar saat mengadakan pertemuan proses komunikasi anda dengan anggota KPM PKH bisa berjalan dengan efektif?**

*“jadi PKH ini bantuannya disalurkan melalui ibu-ibu mbak, jadi ya saat pertemuan gitu semua anggotanya ibu-ibu. Setiap masing-masing KPM kan memiliki tingkat pengalaman maupun pendidikan yang berbeda sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Dan setiap daerah yang saya dampingi itu kan tipekal masyarakatnya dalam memahami sesuatu itupun juga berbeda. Maka dari itu agar saya bisa menyampaikan informasi dan bisa diterima dipahami oleh kelompok KPM PKH yang sedang saya dampingi, saya meminta bantuan salah satu anggota PKH yang telah ditunjuk sebagai ketua kelompok mereka untuk mengetahui bagaimana karakteristik para KPM yang sedang saya dampingi sehingga pesan yang saya berikan bisa dengan mudah mereka pahami. Begitu pula saat mengedukasi KPM untuk kesadaran diri mengundurkan diri dari PKH jika sudah mampu. sebelum mengadakan pertemuan biasanya kami melihat kondisi dari KPM apakah sedang masa-masa repot. Karena rata-rata disini kan petani jadi kalau pas musim tanam atau panen gitu kan pasti banyak yang repot, jadi kita ngambil waktu yang sekiranya paling longgar. Selain kondisi kita juga*



*mempertimbangkan situasi saat kegiatan berlangsung. Saat kami menyampaikan sebuah informasi ataupun materi saat melakukan pembinaan kepada para KPM biasanya kalau ibu-ibu kan suka ngrumpi ya mbak, jadi kadang sering kali pertemuan jadi rame. Nah pada saat yang tidak kondusif seperti itu kami diam sejenak di tengah-tengah kegiatan sampai ibu-ibu anteng kembali. Karena biasanya mereka akan merasa pekewuh sendiri. Kemudian setelah semua bisa kondusif baru kegiatan dilanjutkan. Sehingga apa yang kami sampaikan bisa didengar dan dipahami. Sedangkan untuk edukasi agar KPM yang sekiranya sudah mampu mau melakukan graduasi mandiri biasanya kami juga melihat-lihat apakah saat itu kondisi psikis KPM dalam keadaan stabil atau tidak agar sat kita menyampaikan pemahaman bisa diterima tanpa menyinggung.”*

**16. Bagaimana cara anda menarik perhatian anggota KPM PKH agar kegiatan pendampingan maupun P2K2 bisa berjalan kondusif?**

*“Biasanya para KPM PKH akan cenderung memperhatiakn ketika saya menginformasikan soal masalah pencairan maupun aturan baru mbak dan juga pada saat saya mengedukasi anggota mengenai sosialisasi untuk melakukan graduasi mandiri. Hal ini terjadi mungkin karena mereka merasa itu hal yang penting bagi mereka karena itu terkait informasi prosedur suatu kebijakan. Namun pada saat kegiatan P2K2 anggota tidak selalu kondusif, kadang saat saya menjelaskan materi mereka juga ada yang mengobrol sendiri, jadi saat seperti itu saya menarik perhatian mereka dengan cara memberikan pemahaman bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hal penting. Sehingga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh mereka dan kemudian mereka dapat menjalankan apa yang telah diinformasikan.”*

**17. Media apa yang anda gunakan untuk kemudahan berkomunikasi dalam implementasi PKH?**

*“saat menyampaikan pesan baik berupa informasi atau apapun itu yang berkaitan dengan PKH biasanya kita menggunakan konsep tatap muka langsung. Jadi kita kan setiapbulan ada pertemuan, naah dalam kegiatan tersebut saya menyampaikan informasi maupun materi kepada KPM secara langsung. Disitu pula biasanya saya memberikan kesempatan kepada para PKH yang memiliki permasalahan terkait PKH untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan jika itu darurat biasanya saya berkomunikasi lewat WA. Namun biasanya saya bertukar informasi dengan ketua kelompok. Jadi para anggota ketika memiliki permasalahan darurat bisa menyampaikannya pada ketua kelompok kemudian ketua kelompok menyampaikn kepada saya. Begitu pula ketika saya memiliki informasi dadakan juga mennginformasikannya lewat ketua kelompok agar disampaikan kepada seluruh anggota.”*

### LAMPIRAN 3

#### Dokumentasi



Kantor Dinas Sosial Ngawi



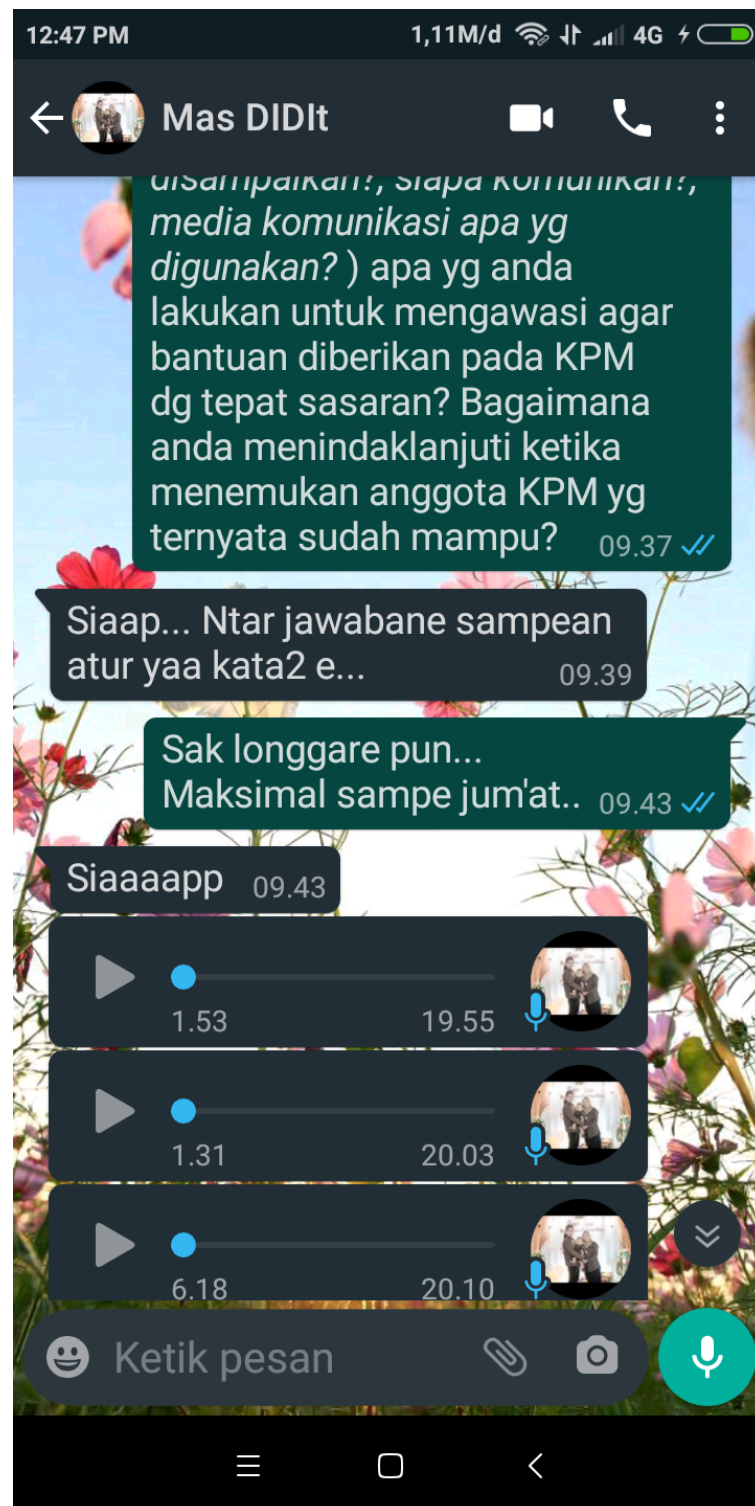
Foto bersama Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



Wawancara dengan Operator PKH Dinas Sosial Kabupaten Ngawi



Wawancara dengan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial



Wawancara dengan sampel pendamping





Kantor Sekertariat PKH Di Dinas Sosial Ngawi



Rapat koordinasi Unit Pelaksana PKH Dinas Sosial Ngawi bersama Kepala Dinas Sosial



Dinas Sosial bekerjasama dengan Radio Suara Ngawi untuk mensosialisasikan PKH



Monitoring ke salah satu penerima PKH oleh Dinas Sosial Ngawi





Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)



Kegiatan pendampingan (potret salah satu kelompok PKH menjalankan komitmen PKH)



Kegiatan pendampingan (potret salah satu kelompok PKH di Desa Babadan menjalankan komitmen PKH )



Kegiatan penandatanganan surat pernyataan dalam proses graduasi mandiri di Babadan santren





Monitoring penerima bantuan PKH oleh Koorkab PKH



Unit Pelaksana PKH Kabupaten melakukan Bimbingan Pemantaban PKH



Monitoring saat salah satu kelompok PKH melakukan kegiatan P2K2 saat pandemi

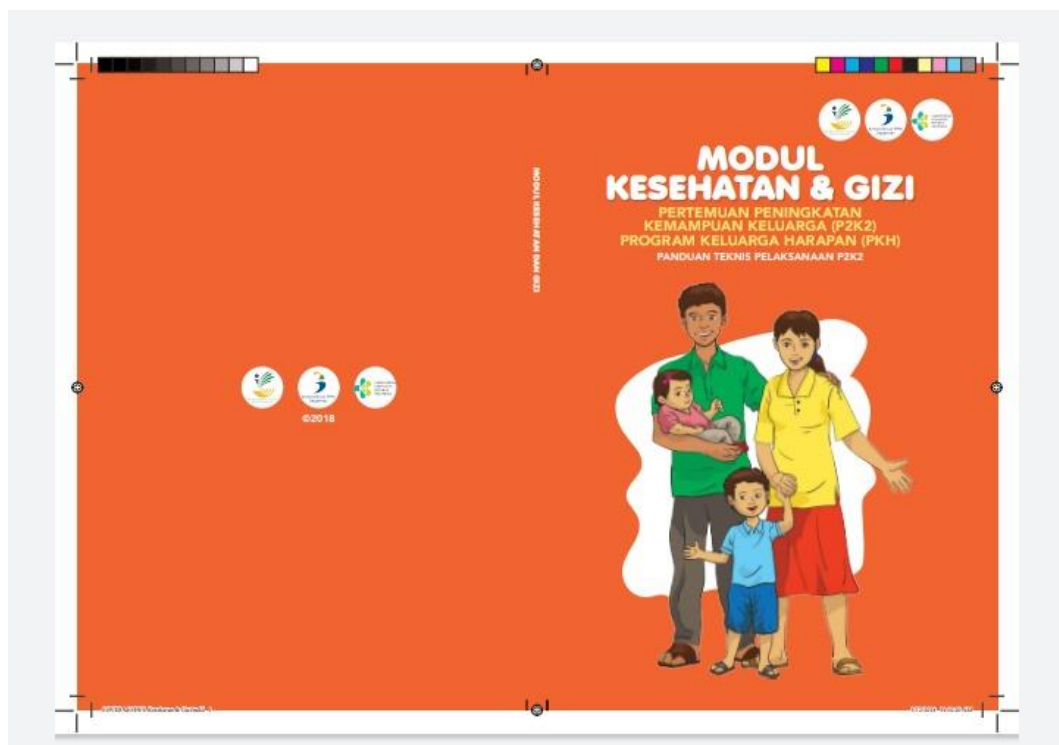


Unit Pelaksana PKH Dinas Sosial melakukan Bimbingan Teknis PKH





Cover modul materi P2K2 tentang Pengelolaan Keuangan & Perencanaan Usaha



Cover modul materi P2K2 tentang Kesehatan dan Gizi



Cover modul materi P2K2 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia dan Disabilitas



Cover modul materi P2K2 tentang Perlindungan Anak



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan M.H Thamrin No.33 Telp.(0351) 746249 Ngawi  
Fax(0351)746249 Email : [Kesbang@ngawikab.go.id](mailto:Kesbang@ngawikab.go.id)  
Website:<http://www.kesbang.ngawikab.go.id>

**REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / KEGIATAN**

Nomor : 072 / 120 / 404.208 / 2020

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.

Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tanggal 14 Agustus 2020 Nomor : B-2064/In.10/F.I/PP.01.1/08/2020 Perihal Ijin Penelitian

Kepala Kantor Kesbangpol, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : RAKHMA ROUDLOTUL KHUSNA
- b. Alamat : Lorat RT 001 RW 004 Desa Babadan Kecamatan Pangkur
- c. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi dalam Mengatasi masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Tujuan : Mencari Data
- c. Bidang Penelitian : Sosial
- d. Penanggung Jawab : Dr.Hj. Kamila Adnan, M.Si
- e. Anggota / Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 11 Juli s/d 30 September 2020
- g. Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

- Dengan Ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian / survey / kegiatan;
  2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah / lokasi setempat;
  3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Ngawi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dalam kesempatan pertama.
- Demikian rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Ngawi, 18 Agustus 2020

A.n. KERAJA KANTOR KESATUAN BANGSA,  
DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI  
Kasi Kesbang  
  
**DHANANG WAHYUDI P.S.STP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19840412 200212 1 002

**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi;
  2. Ketua Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  3. Yang Bersangkutan.